

KADIN NEWS

VOL. 14 | SEPTEMBER 2024



**Arah Pembangunan
dan Kebijakan Bidang
Ekonomi 2024-2029**

8% Bisa Dengan 7 Fokus **White Paper Arah Pembangunan Ekonomi 2024-2029**

Tegakkan AD/ART, Ketua
Umum Kadin Indonesia
Tegaskan Hanya Ada
#SatuKadin

56 Tahun Kadin Indonesia:
Perkuat Soliditas dan Jaga
Persatuan

ISF 2024:
11.000 Peserta dari lebih 73
Negara Hadir Untuk Bahas Isu
Keberlanjutan

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

01	Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia	Manfaat Keanggotaan Kadin	56
03	White Paper	Cara Pendaftaran Anggota Kadin	57
10	Liputan Khusus: Pelanggaran AD/ART	Fitur Terbaru Website Kadin	58
35	FGD/Seminar	Kabar Terkini: Prof Jimly Ingatkan Putusan MK Soal Wadah Tunggal Kadin Indonesia	59
37	Program Pengurus	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin for Naker	61
40	Kolaborasi Internasional	Inisiatif Kadin Indonesia: Wiki Export	62
41	Special Section Forum Bisnis Daerah (Forbisda) 2024	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin Net Zero Hub	63
43	Ulang Tahun Kadin Indonesia ke 56 tahun	Inisiatif Kadin Indonesia: TRADE	64
48	Indonesia International Sustainability Forum 2024		

SAMBUTAN KETUA UMUM

Kadin Indonesia



Di tengah dinamika yang kita hadapi sebagai organisasi selama bulan September ini, saya merasa berbesar hati karena kita semua tetap menjaga marwah Kadin terutama dalam menjalankan peran sebagai rumah sebagai pengusaha nasional dan memperjuangkan terciptanya kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. 56 tahun perjalanan Kadin Indonesia merupakan bukti komitmen pengusaha Indonesia terhadap marwah Kadin Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama, demi #SatuKadin, Satu Indonesia, dan satu masa depan yang lebih baik untuk kita semua

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya yang senantiasa mengiringi langkah Kadin Indonesia dalam memajukan dunia usaha di negeri ini.

Saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Pengurus, anggota, dan tim Sekretariat Kadin Indonesia atas dukungan dan kerja keras dalam menjaga marwah serta pelaksanaan tugas pokok & fungsi Kadin Indonesia. Anda sekalian telah menjadi pilar utama dalam perjalanan kedewasaan Kadin Indonesia. Bahkan dalam situasi yang penuh tantangan pun, kita semua dapat tetap fokus menjalankan sejumlah program strategis dan mendorong tetap berjalannya layanan bagi dunia usaha.

Di bulan September yang penuh dinamika, telah terjadi 2 peristiwa penting. Pertama, dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART pada 14 September 2024. Izinkan saya untuk kembali menegaskan bahwa hanya ada #SatuKadin, organisasi payung resmi bagi pengusaha yang diakui berdasarkan Undang-Undang dan AD/ART. Untuk itu, mari kita jaga persatuan dan soliditas demi kelangsungan serta keberlanjutan organisasi ini.

Peristiwa penting lainnya adalah HUT 56 tahun Kadin Indonesia, berlangsung di tengah situasi yang penuh tantangan, perayaan HUT selain dilakukan untuk memperkuat silaturahmi tetapi juga untuk menampilkan hasil-hasil awal rekomendasi Kadin Indonesia bagi program pembangunan ekonomi 2024-2029. Kita percaya 8% pertumbuhan ekonomi bisa dicapai melalui 7 program prioritas.

Di bulan September, Kadin Indonesia juga bersyukur karena melalui kolaborasi dengan mitra pemerintah dan dunia usaha, dapat menjadi co-host dari kegiatan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 dan Forum Bisnis Daerah. ISF merupakan forum internasional yang dihadiri oleh lebih dari 11.000 peserta dari 73 negara, sebuah kolaborasi besar untuk membahas isu keberlanjutan. Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang diselenggarakan pada 19 September 2024, sebagai event penting juga menghadirkan 15 tenant, 16 pembicara dan diikuti oleh 330 peserta, dengan tujuan untuk mendorong sinergi antar wilayah untuk menciptakan stabilitas harga, meningkatkan distribusi barang yang efektif, serta memperkuat ketahanan pangan, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur.

Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan gotong royong, tegak lurus dengan AD/ART, demi mencapai tujuan besar kita bersama. Lewat komitmen dan kerja keras yang berkelanjutan, saya percaya kita akan mampu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% dan visi Indonesia Emas 2045.

Salam,

M. Arsjad Rasjid P. M.

Ketua Umum Kadin Indonesia

Sorotan Kegiatan **Bulan Ini**



MEETING
PENGURUS BIDANG



MEETING DENGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA



AUDIENSI



EVENT



ANGGOTA BARU



ANGGOTA YANG
MEMPERPANJANG KTA



PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA



KUNJUNGAN
INTERNASIONAL



8% Bisa dengan 7 Fokus

White Paper Usulan Strategi/Arah Pembangunan
Bidang Ekonomi Tahun 2024-2029

WHITE PAPER

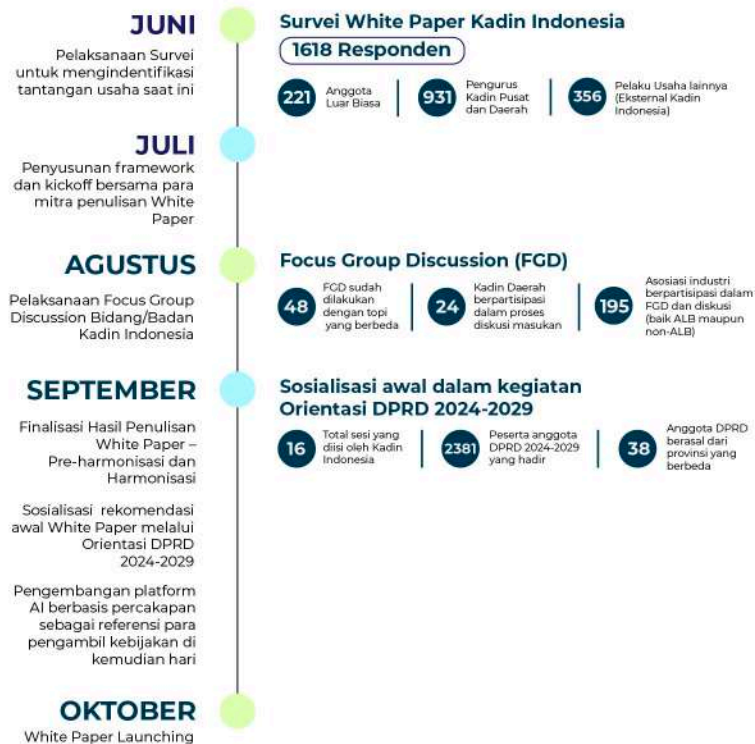
Kadin Indonesia Rampungkan White Paper Arah Pembangunan Ekonomi 2024-2029

Penyusunan White Paper Arah Pembangunan Ekonomi 2024-2029 tengah memasuki tahap finalisasi. White paper yang bertujuan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% dan visi Indonesia Emas 2045 ini proses penyusunannya bersifat inklusif dan melibatkan >2.000 pengurus lewat survei dan FGD, 24 Kadin Daerah dan 195 asosiasi sektoral dan juga Kamar Dagang internasional di Indonesia.

Proses penyusunan telah berlangsung sejak bulan Juni hingga Oktober 2024, melibatkan lebih dari 300 pelaku industri dan 1.600 pengurus dari tingkat pusat dan daerah. Kadin Indonesia juga melibatkan sejumlah mitra strategis, termasuk: 5P, BCG, Daya Lima, HukumOnline.com, IBC, INDEF, McKinsey & Company, serta Universitas Gadjah Mada.

Tahap awal dari penulisan adalah identifikasi masalah lewat survei tantangan melakukan kegiatan usaha yang dilakukan pada bulan Juni 2024 dan diikuti lebih dari 1.600 responden. Dilanjutkan dengan penggodokan framework White Paper Usulan/Arah Pembangunan Ekonomi 2024-2029 bersama seluruh mitra strategis dan Pengurus Bidang/Badan di bulan Juli, serta pengumpulan masukan dan harmonisasi rekomendasi melalui 48 FGD sampai dengan pertengahan September 2024. Temuan-temuan awal dari white paper ini telah disampaikan juga pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kadin ke-56 di tanggal 25 September 2024.

Progress Penyusunan White Paper Kadin Indonesia (Juni-Oktober 2024)



Melalui **Proses Inklusif dan Kolaboratif**, White Paper Arah Pembangunan Ekonomi 2024-2029 Melibatkan Pelaku Usaha, Asosiasi Industri, dan Mitra di Tingkat Nasional dan Daerah

48+ Focus Group Discussions

dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari

300+
Pelaku Industri

1600+
Pengurus
tingkat pusat dan daerah
berpartisipasi dalam

Berkolaborasi dengan
8 mitra



WHITE PAPER

White Paper Usulan/Arah Pembangunan Ekonomi 2024-2029: Pandangan Anggota DPRD 2024-2029 Terpilih Pada Kerangka Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Sebagai bagian dari upaya sosialisasi usulan/arrah pembangunan ekonomi nasional 2024-2029, serta bentuk undangan dari dunia usaha kepada Pemerintah Daerah untuk memperlancar kolaborasi strategis guna mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi 8%, maka Kadin Indonesia mengundang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangkaian 16 kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama anggota DPRD terpilih periode 2024-2029.

Sesi Kadin Indonesia dan UGM dalam Bimtek ini diharapkan dapat mendorong alignment antara dunia usaha, pemerintah pusat, dan daerah dalam menciptakan program kerja yang mendorong target pertumbuhan ekonomi 8%

Baca lebih lanjut mengenai pengalaman peserta Bimtek dan pandangan mereka atas framework White Paper yang dipaparkan.

Materi yang diberikan Kadin tentang kondisi ekonomi global sangat menarik dan membuka wawasan kita. Kita juga jadi mengerti bagaimana kondisi negara kita sekarang ini dan bagaimana juga kondisi kita menghadapi dunia luar, karena ekonomi ini saling mempengaruhi. Kadin Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya melalui pemberdayaan koperasi yang menjadi inti ekonomi kita. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor desa dan kecamatan, kita berharap kontribusi ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Semoga Kadin terus berjaya dan sukses dalam menjalankan misinya."

Hendra Gunawan

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kadin ini sangat luar biasa. Kadin memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek ekonomi, sehingga sebagai generasi milenial di DPRD provinsi, kami sangat tertarik untuk terlibat lebih jauh dengan Kadin. Terlebih lagi, dengan adanya bonus demografi yang kini dimiliki Indonesia, Insya Allah, kita dapat bersama-sama menyambut Indonesia Emas."

Fadel Muhammad Tauphan

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



WHITE PAPER

Editor in Chief Gathering

Dalam rangka memperkenalkan dan mendapat input dari media terhadap White Paper Usulan/Arah Pembangunan Ekonomi Nasional 2024-2029, Kadin Indonesia menyelenggarakan pertemuan bersama pimpinan media nasional (Editor in Chief Gathering) pada 3 Oktober 2024 di Jakarta.

Dibuka dengan presentasi oleh Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro yang memperkenalkan framework strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% melalui 4 pilar, White Paper Usulan/Arah Pembangunan Ekonomi 5 tahun kedepan juga mengidentifikasi 7 prioritas atau fokus area pembangunan yang dipercayai dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi sampai ke 8%, bersama 19 topik pembangunan lainnya.



Temuan penting berikutnya dalam White Paper Arah Pembangunan dan Ekonomi 2024-2029 yang digarisbawahi oleh Ketua Umum Arsjad Rasjid adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi 8 Misi Asta Cita serta rekomendasi dunia usaha yang tercakup dalam White Paper ini. Khususnya dalam rangka memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun sektor bisnis, bekerja sama dan align dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.



Selanjutnya, Prof. Bambang juga menggarisbawahi pentingnya keberadaan sejumlah faktor pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur terintegrasi, dan teknologi transversal. Menggunakan slogan "8% Bisa dengan 7 Prioritas", berikut adalah program-program prioritas yang dimaksud: resiliensi kesehatan, ketahanan energi, infrastruktur yang terintegrasi, penguatan sektor manufaktur, akselerasi kapasitas UMKM, pengembangan ekosistem ketahanan pangan, dan 'green business hub' terbesar di dunia.





WHITE PAPER

Proses Advokasi Inklusif: Harmonisasi Rekomendasi White Paper Usulan/Arah Pembangunan Ekonomi 2024-2029



Proses advokasi yang inklusif merujuk kepada pendekatan advokasi yang memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) turut dilibatkan dalam tahap-tahap advokat. White paper yang disusun oleh Kadin Indonesia merupakan produk advokasi yang sesuai arahan Ketua Umum Arsjad Rasjid disusun melalui proses yang inklusif, termasuk survei terhadap Kadin Daerah, Asosiasi, Sektoral, serta Pengurus dengan total 1.618 pengurus, 48 FGD, dan selusin sesi harmonisasi rekomendasi bersama pengurus.

Harmonisasi penyusunan rekomendasi ini menjadi tahap akhir dari seluruh rangkaian proses FGD dan diskusi yang telah berlangsung, guna memastikan bahwa isi white paper benar-benar selaras dengan prioritas utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien melalui koordinasi bersama pemerintah.

Proses harmonisasi rekomendasi melibatkan Dewan Pengurus Harian, serta para ahli dari mitra-mitra dan berlangsung sepanjang periode 24-27 September 2024 secara *hybrid* (online dan offline).



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8% Bisa Tercapai Dengan 7 Fokus Utama

1

Infrastruktur yang terintegrasi, mudah diakses & terjangkau

(mis., pembangunan perumahan vertikal yang terjangkau, perencanaan infrastruktur multi-moda)



2

Membangun ketahanan & transformasi layanan kesehatan

(mis., makanan sehat yang bernutrisi & bergizi, penambahan jumlah fasilitas kesehatan)



3

Mewujudkan ketahanan energi

(mis., percepatan komersialisasi gas alam serta cadangan strategis migas, percepatan pengadaan energi terbarukan)



4

Mengakselerasi pertumbuhan UMKM

(mis., meningkatkan produktivitas UMKM)



5

Memperkuat basis manufaktur melalui re-industrialisasi

(mis., manufaktur EV, hilirisasi sumber daya alam dan industri dengan potensi domestik dan ekspor)



6

Membangun pusat pengembangan bisnis hijau terbesar di dunia

(mis., Nature Based Solutions (NBS), Sustainable Aviation Fuel (SAF), Carbon Capture and Storage (CCS))



7

Membangun ekosistem ketahanan pangan mandiri

(mis., meningkatkan ekspor aquaculture, neraca pangan terintegrasi & infrastruktur terkait cadangan pangan)



“

Langkah menuju pertumbuhan 8% bisa dicapai dengan adanya keselarasan dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta dunia usaha.

”



**M. Arsjad
Rasjid P.M.**

Ketua Umum Kamar
Dagang dan Industri
Indonesia (2021-2026)

Terima Kasih Kepada Para Mitra Kami







Siaran Pers - 14 September 2024

Munaslub Kadin 2024 Ilegal dan Melawan Aturan Organisasi Serta Keppres No. 18/2022

Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merupakan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia. Terlebih lagi, sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub.

Dari sisi proses, Munaslub dinyatakan kuorum dan keputusannya sah apabila dihadiri oleh lebih Penolakan terhadap pelanggaran aturan AD/ART Kadin Indonesia ini pun telah disuarakan oleh mayoritas Kadin Daerah dan ALB Anggota Kadin Indonesia. Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia pun telah menolak dan menyatakan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono mengatakan, bahwa pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 hari ini tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART Kadin Indonesia. "Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak. Dengan terdapatnya 21 penolakan Kadin Daerah, maka pelaksanaan Munaslub 2024 ini adalah tidak kuorum dan ilegal," tegas Dhaniswara.

Dhaniswara menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, khususnya Pasal 18. Berdasarkan Pasal tersebut, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

"Dalil yang digunakan untuk Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu, di mana keterlibatan beliau dilakukan atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin. Beliau juga mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie," tambah Dhaniswara.

Dalil yang digunakan sebagai alasan Munaslub tersebut juga tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 14 AD/ART, yaitu Kadin bukan organisasi politik dan terlibat politik praktis, di mana Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagian nya. Dalil tersebut bertentangan sebab Arsjad Rasjid telah menunjuk Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Yukki N. Hanafi, sebagai Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia ketika dirinya berhalangan sementara, di mana keputusan ini disetujui oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Dhaniswara menambahkan bahwa Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB) tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengunduran diri Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid karena pengunduran diri adalah hak pribadi yang diatur dalam Pasal 38 AD Kadin dan PO 278 tentang Pergantian Antarwaktu.



Selain itu, Munaslub juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang saat ini tercatat sebanyak 221 Anggota Luar Biasa (ALB) sesuai ketentuan AD/ART Pasal 8 Ayat 2 yang menyatakan Munaslub dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah Kadin Provinsi dan 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) tingkat nasional yang mengikuti Munas VIII tahun 2021 lalu. Adapun tercatat sebanyak 34 Kadin Provinsi dan 124 ALB, maka diperlukan masing-masing satu per dua dari jumlah kehadiran Kadin Provinsi dan ALB tersebut.

Dalam mekanisme AD/ART tertulis, sebelum pengajuan, pihak yang meminta Munaslub wajib mengirimkan surat peringatan tertulis pertama dan kedua kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dengan batas waktu masing-masing 30 hari untuk perbaikan. Dalam hal ini, hingga saat ini belum ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh Ketua Umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menyampaikan bahwa Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum. "Karena itu, kami baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub yang menyalahi AD/ART," tutup Eka.





Siaran Pers - 15 September 2024

Tanggapi Munaslub Ilegal, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid Tegaskan 'Hanya Ada Satu Kadin' Sesuai UU dan Mandat AD/ART

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan sikapnya untuk tetap berpegang teguh pada AD/ART Kadin Indonesia yang berlandaskan UU No. 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022, khususnya dalam memimpin Kadin Indonesia sebagai satu-satunya organisasi wadah bagi dunia usaha. Hal itu disampaikannya untuk menanggapi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9), yang telah menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART," ujar Arsjad.

Arsjad menambahkan, dia dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 juga melalui proses dan tata cara yang sah dan sesuai ketentuan UU dan aturan organisasi, yaitu dipilih secara aklamasi berdasarkan Keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Pada kesempatan ini, telah hadir bersama saya sejumlah pengurus, juga 21 Ketua Umum Kadin Provinsi, serta perwakilan dari Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. Saya mengajak, mari sama-sama kita patuhi dan tegakkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi kemajuan organisasi dunia usaha yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Arsjad.

Sebagaimana diketahui, pada Sabtu kemarin (14/9) telah diselenggarakan Munaslub yang diinisiasi Dewan Pertimbangan dan segelintir pengurus Kadin Indonesia. Munaslub tersebut kemudian menyepakati penunjukan Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 untuk menggantikan Arsjad Rasjid. Karena telah menyalahi ketentuan AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub tersebut telah mendapatkan penolakan dari Dewan Pengurus Kadin, mayoritas Ketua Umum Kadin Daerah, dan ALB.

(lanjutan di halaman 14)



Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono mengatakan, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.



“Dalil yang digunakan untuk menyelenggarakan Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu, tidak bisa dijadikan alasan, mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin. Beliau juga mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie,” papar Dhaniswara.

Dhaniswara melanjutkan, penyelenggaraan Munaslub juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam AD/ART Kadin Indonesia.

“Tidak pernah ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh Ketua Umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Surat-surat yang dikirimkan Kadin Provinsi kepada Kadin Indonesia terkait permohonan pengunduran diri Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan surat penyelenggaraan Munaslub tidak memenuhi unsur untuk dapat diklasifikasikan sebagai Surat Peringatan Pertama,” jelasnya.

Selain itu, sesuai Pasal 18 ayat 2 AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir. Untuk mengajukan usulan Munaslub, Kadin Provinsi juga harus menggelar Rapat Pleno terlebih dahulu.

(lanjutan di halaman 15)

Kemudian dalam Pasal 18 ayat 12 AD/ART dinyatakan Munaslub tercapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih setengah (50% +1) dari Peserta Penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslub.



“Berdasarkan informasi yang kami terima, Munaslub ilegal kemarin hanya diikuti oleh 25 ALB yang mana jumlah tidak mencapai setengah jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir setidaknya 50+1 dari 124 jumlah ALB. Dengan demikian, Munaslub itu tidak sah,” tandasnya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, Munaslub yang digelar bukan saja ilegal, tapi juga telah mengusik keharmonisan organisasi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.



“Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan keputusan Munas VIII Kadin Indonesia. Hasil itu disepakati termasuk oleh pihak-pihak yang sekarang menjadi inisiator Munaslub. Ini sebuah ironi. Ini ibarat menenggelmakan kapal sendiri,” lontar Yukki.

Sebelumnya, penolakan terhadap Munaslub juga disampaikan oleh 21 dari total 35 Kadin Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

“Kami menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah. Kami menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah dunia usaha,” ujar Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang.



Bapak/Ibu dapat memindai QR code berikut untuk menyaksikan pernyataan lengkap Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, yang disampaikan ketika sesi Konferensi Pers, 15 September 2024

Siaran Pers - 17 September 2024

Kadin Indonesia Segera Sanksi Peserta Munaslub Ilegal



Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah melakukan kajian legalitas serta investigasi adanya pelanggaran oleh sejumlah pihak, termasuk beberapa pengurus, dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Ilegal pada Sabtu (14/9), di Jakarta. Sehubungan dengan itu, Dewan Pengurus juga telah menggelar rapat pengurus diperluas dengan 21 Ketua Umum Kadin Provinsi yang dilaksanakan pada Minggu (15/9) untuk memutuskan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Munaslub ilegal tersebut.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva mengatakan, dapat disimpulkan bahwa Munaslub pada Sabtu adalah tidak sah dan ilegal karena menyalahi baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (UU Kadin), Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kamar Dagang dan Industri.

"Dalam menjawab persoalan apakah Munaslub pada Sabtu kemarin dapat dibenarkan secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kita harus mengacu dan mengedepankan UU Kadin no 1 tahun 1987, Keppres 18/2022, dan AD/ART Kadin Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18 ayat (1), Munaslub diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus mengenai pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan Munaslub juga harus didahului adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua, yang mana Dewan Pengurus diberikan waktu masing-masing 30 hari untuk memperbaiki.

"Jadi, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tidak terpenuhi berkenaan dengan tidak adanya pelaksanaan pertanggungjawaban dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dalam hal ini oleh Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah," kata Hamdan.

(lanjutan di halaman 17)



Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 tersebut juga menggarisbawahi alasan penyelenggaraan Munaslub. Mengacu pada Undang-uan Munaslub, tidak dapat diketahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi alasan atau latar belakang diadakannya Munaslub 2024.

“Berdasarkan informasi yang berkembang di media massa, diketahui bahwa dalih diadakannya Munaslub adalah bergabungnya Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin, sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029,” kata Hamdan.



Menurut Hamdan, apabila ini yang menjadi alasan, sesuai Pasal 37 huruf a Anggaran Dasar Kadin tentang Pendelegasian Wewenang, tindakan Arsjad Rasjid tersebut adalah sah. Mengingat, sebelum ditetapkan menjadi Ketua Tim Pemenangan, Arsjad Rasjid dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Kadin telah menunjuk Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi (Yukki Nugrahawan Hanafi) sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Ketua Umum Kadin Indonesia.

“Jadi, tidak terbukti adanya pelanggaran Pasal 14 Anggaran Dasar Kadin Indonesia, karena kedudukan Arsjad Rasjid dalam Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 merupakan hak politik setiap warga negara dan telah menempuh mekanisme dan prosedur yang berlaku sesuai Pasal 37 Anggaran Dasar Kadin Indonesia,” jelas Hamdan.

Hamdan juga menjelaskan, pelaksanaan Munaslub tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) AD/ART yang mensyaratkan adanya permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Kadin Provinsi dan 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir. Selain itu, penyelenggaraan Munaslub juga harus didahului adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua, yang mana Dewan Pengurus diberikan waktu masing-masing 30 hari untuk memperbaiki.

“Tidak terpenuhinya ketentuan ini diperkuat dengan adanya penolakan dari 21 Kadin Provinsi atas hasil Munaslub 2024 dengan agenda menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum terpilih,” lontar Hamdan.

“Selanjutnya, kewenangan Munaslub 2024 dalam memilih dan menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum adalah tidak sah karena tidak didahului oleh pelaksanaan pertanggungjawaban Dewan Pengurus dan keputusan Munaslub apakah menerima atau menolak pertanggungjawaban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (11) AD/ART.

“Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terutama adanya penolakan dari 21 Kadin Provinsi, maka Munaslub tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (12) yang menyatakan Munaslub tercapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih setengah (50% +1) dari Peserta Penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslub,” tegas Hamdan.

Terakhir, ia menutup pernyataannya dengan menyatakan Dewan Pengurus Kadin yang sah secara hukum adalah Pengurus yang berada di bawah kepemimpinan Bapak Arsjad Rasjid.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono menambahkan, Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan kewenangannya telah melakukan investigasi, pemeriksaan dan pengkajian yang memberikan petunjuk adanya pelanggaran oleh anggota kepengurusan (Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus), beberapa Ketua Umum Kadin Provinsi, dan ALB berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub. Bukti-bukti tersebut di antaranya surat undangan Munaslub dan Konvensi ALB yang cacat prosedural, serta surat penolakan terhadap Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

"Klaim yang disampaikan oleh pihak penyelenggara Munaslub bahwa 28 Kadin Provinsi dan 25 ALB mendukung. Namun kami menemukan fakta bahwa hanya 13 Kadin Provinsi yang mendukung dan hanya dihadiri 10 Ketua Kadin Provinsi. ALB juga hanya 23 dari total anggota 124 yang berhak untuk hadir di dalam Munaslub. Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan Peraturan Organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran," ujar Dhaniswara.



Dhanis menjelaskan, berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepengurusan, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui keputusan Rapat Pengurus Harian dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan dan pemberhentian sebagai Anggota Kadin tanpa surat peringatan terlebih dahulu.

Sementara untuk Ketua Umum Kadin Provinsi yang melakukan pelanggaran, Dewan Pengurus Kadin Indonesia sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B). Begitu juga dengan ALB yang terlibat Munaslub, dapat dikenai sanksi pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

"Jadi, sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, dalam keadaan genting, Dewan Pengurus dapat mencabut keanggotaan Ketua Umum Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa," tegas Dhaniswara.

Sebagai informasi tambahan, Dewan Pengurus telah melayangkan surat kepada Presiden mengenai permohonan kepada pemerintah selaku Pengawas Kadin Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai UU nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022. Dewan Pengurus juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM berisi permohonan audiensi dan penundaan proses pembuatan Keppres baru tentang Kadin Indonesia.

PELANGGARAN AD/ART KADIN

5 Fakta yang Menegaskan Munaslub Ilegal

Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 menyampaikan 5 alasan kenapa Munaslub dinyatakan ilegal:

- 01 Tidak Memenuhi Alasan Sah**
Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar (AD) Kadin dalam Keppres No. 18 Tahun 2022, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hanya dapat dilakukan jika ada pelanggaran anggaran, penyelewengan keuangan/perbendaharaan dan disfungsi kepengurusan. Namun, investigasi menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi sehingga alasan untuk mengadakan Munaslub tidak sah.
- 02 Prosedur Tidak Sesuai AD/ART**
Munaslub harus diinisiasi oleh 50%+1 dari Kadin Provinsi, serta setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) yang memiliki hak suara. Namun, Munaslub ini hanya didukung oleh 13 Kadin Provinsi, jauh dari syarat minimal.
- 03 Mayoritas Kadin Provinsi Menolak**
Sebanyak 21 Ketua Umum Kadin Provinsi secara resmi telah menolak Munaslub tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan tidak memenuhi syarat hukum.
- 04 Pelanggaran Tenggat Waktu Pengajuan**
Munaslub seharusnya diajukan setelah dua kali peringatan tertulis dalam tenggat 2x30 hari. Namun, syarat tersebut tidak dipenuhi, menjadikan pelaksanaan Munaslub ilegal.
- 05 Dugaan Pemalsuan Data dan Tanda Tangan**
Investigasi sedang mendalami dugaan adanya pemalsuan dokumen yang digunakan dalam proses Munaslub. Jika terbukti, ini akan ditindaklanjuti melalui jalur hukum.



Siaran Pers - 25 September 2024

Dewan Pengurus Kadin Indonesia Mulai Ambil Langkah Tegas Atas Penyelenggaraan Munaslub Ilegal

Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengambil sejumlah langkah sebagai tindak lanjut dari investigasi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024. Langkah tersebut mencakup upaya hukum maupun langkah organisasi terhadap sejumlah pihak yang terlibat Munaslub.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva mengatakan, dari sisi alasan, proses, dan prosedur, Munaslub tersebut tidak sah dan ilegal karena menyalahi baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin), Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.



“Keterlibatan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dalam tim pemenang salah satu pasangan calon presiden tidak dapat dijadikan alasan untuk menggelar Munaslub. Sebagaimana penjelasan Pasal 5 Undang-undang Kadin, pengusaha Indonesia yang menjadi anggota partai politik dapat menjadi anggota atau pengurus Kadin, tetapi tidak dibenarkan menyalurkan aspirasi politiknya melalui Kadin. Apalagi, Arsjad Rasjid saat itu memutuskan cuti dari jabatannya sebagai Ketua Umum,” jelas Hamdan.

Hamdan melanjutkan, dari sisi prosedur, Munaslub hanya bisa diusulkan oleh paling sedikit setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB) berdasarkan Munas terakhir. Kemudian, ada dua kali surat peringatan terlebih dahulu dengan masing-masing surat diberikan tenggat waktu 30 hari bagi Dewan Pengurus untuk melakukan pertanggungjawaban.

Dari sisi proses, Munaslub dinyatakan kuorum dan keputusannya sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (50%+1) peserta penuh. Berdasarkan Munas VIII tahun 2021 di Kendari, tercatat ada 34 Kadin Provinsi dan 124 asosiasi industri yang menjadi ALB Kadin Indonesia. Selain itu, penentuan peserta dari ALB melalui konvensi dilaksanakan paling lambat tiga hari sebelum Munaslub.

(lanjutan di halaman 21)



"Berdasarkan hal tersebut, ditambah dengan adanya penolakan dari 21 Kadin Provinsi, maka penyelenggara Munaslub menjadi tidak sah dan ilegal karena tidak mengikuti UU Kadin, AD/ART maupun peraturan organisasi," tandas Hamdan.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono mengatakan, berdasarkan investigasi dan kajian legal yang dilakukan, Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengambil sejumlah langkah baik hukum maupun secara organisasi. Pertama, mengajukan laporan ke polisi atas dugaan pencatutan nama atau pemalsuan surat terkait dengan kehadiran sejumlah Ketua Umum Kadin Provinsi di Munaslub. Kedua, mengirimkan surat kepada 7 anggota pengurus, 14 Ketua Umum Kadin Provinsi, dan 27 ALB untuk meminta klarifikasi atas keterlibatan mereka dalam Munaslub. Selanjutnya, Dewan Pengurus juga sedang menyiapkan untuk menggugat ke pengadilan atas pelaksanaan Munaslub.

"Terkait dengan pengiriman surat permintaan klarifikasi kepada sejumlah pengurus, Ketua Umum Kadin Provinsi, dan ALB, hal ini dilakukan dengan itikad baik agar ada penjelasan dari mereka yang bisa menjadi pertimbangan sebelum Dewan Pengurus memberikan sanksi organisasi. Sesuai Peraturan Organisasi, untuk pelanggaran yang sifatnya luar biasa, sebenarnya Dewan Pengurus bisa memberikan sanksi berat berupa pemberhentian atau pencabutan keanggotaan," ungkap Dhaniswara.



Denny Kailimang yang juga menjadi Kuasa Hukum Kadin Provinsi menambahkan, sebanyak lima Ketua Umum Kadin Provinsi pagi tadi telah melaporkan sejumlah oknum ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

"Jadi, lima Ketua Umum Kadin Provinsi ini telah melapor ke polisi sehubungan dengan pencatutan nama atau pemalsuan surat yang seolah mereka hadir atau mendukung pelaksanaan Munaslub," jelas Denny.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Firlie Ganinduto menegaskan, Kadin Indonesia adalah satu-satunya organisasi wadah dunia sekaligus mitra strategis pemerintah yang pembentukannya berdasarkan konstitusi, dalam hal ini UU Kadin dan Keppres 18/2022 mengenai AD/ART Kadin Indonesia. Sesuai dengan hal tersebut, hanya boleh ada satu Kadin Indonesia.

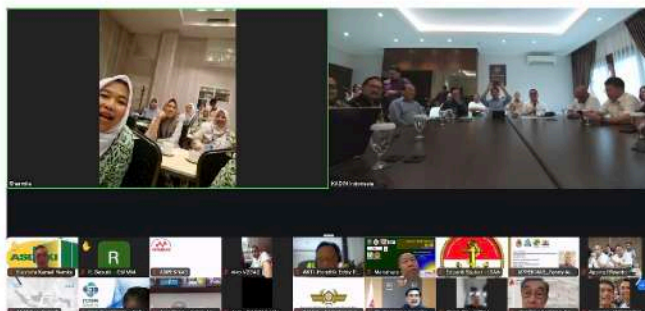
"Ini bukan soal Arsjad Rasjid atau soal Anindya Bakrie. Ini soal tegak lurus konstitusi. Karena itu, kami serukan kepada seluruh pengurus maupun anggota, termasuk Kadin Daerah untuk bersatu menegakkan konstitusi dan bersama menyatakan, hanya ada satu Kadin Indonesia, yaitu yang berlandaskan UU Nomor 1/1987 dan Keppres 18/2022. Hal ini penting agar terdapat solusi bersama untuk kolaborasi dan sinergi bagi pertumbuhan perekonomian nasional," tandasnya.

PELANGGARAN AD/ART KADIN

Siaran Pers - 6 Oktober 2024

**Kadin Indonesia Gelar Rapat Konsolidasi ALB
untuk Persiapan Munas IX**

Kadin Indonesia terus memperkuat langkah persiapan menuju Musyawarah Nasional (Munas) IX melalui rapat konsolidasi bersama 238 Anggota Luar Biasa (ALB) pada 3 Oktober 2024 di Jakarta.



Dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo, rapat ini menegaskan kembali pentingnya soliditas dan sinergi internal demi menjaga marwah organisasi Kadin Indonesia, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia, Wisnu W Pettalolo, menekankan bahwa Kadin Indonesia berkomitmen menjalankan solusi atas dinamika internal dengan menggelar Munas setelah pelantikan presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga integritas organisasi dan memastikan Kadin tetap menjadi mitra strategis pemerintah," ujar Wisnu. Rapat konsolidasi ini juga berfungsi memastikan bahwa semua ALB siap berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara mereka melalui proses yang transparan sesuai ketentuan AD/ART Kadin dan Keppres No. 18 Tahun 2022.

Dalam proses menuju Munas IX, ALB Kadin Indonesia akan diwakili oleh 30 asosiasi dari 15 klaster sektor industri dan jasa. Persiapan matang ini memastikan Munas berjalan sesuai aturan dan mengakomodasi partisipasi penuh dari para pemangku kepentingan. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Handaka Santosa, menyatakan kesiapan penuh dari para ALB untuk berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan Munas IX yang inklusif dan transparan.

*Ibu, Bapak
Keluarga besar Kadin Indonesia,
Kadin Provinsi, Kadin Kabupaten/Kota,
Anggota Luar Biasa,
Para pelaku usaha,
Teman-teman buruh, professional
serta seluruh masyarakat Indonesia.*

*Beberapa hari terakhir,
Saya mendapat banyak pertanyaan, dari internal Kadin, media, dan warganet, tentang solusi atas
dinamika Kadin. Terutama terkait solusi, yang saya dan Mas Anin sepakati, dalam pertemuan bersama
Pak Bahlil.*

*Agar tak ada lagi kebingungan di pemangku kepentingan Kadin dan
masyarakat, izinkan saya meluruskan, dan menyampaikan hasil
pertemuan tersebut.*

*Jumat, 27 September 2024 pukul 3 sore, Pak Bahlil
mengundang saya dan mas Anin ke kediaman beliau.
Di mana, pertemuan tersebut telah direncanakan, dan
disampaikan kepada kami, beberapa hari sebelumnya.*

*Kami duduk bersama, saling mendengarkan, dan
berdiskusi. Dan kami telah mencapai sebuah kesepakatan,
yang dituangkan secara tertulis, dan ditandatangani di
atas materai, oleh semua pihak.*

*Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional
Kadin, setelah pelantikan Presiden terpilih. Adapun waktu
dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah.*

*Kami juga sepakat bahwa, kepanitiaan Munas akan
dibentuk, sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin
Indonesia, yang dipersiapkan bersama-sama,
dengan melibatkan kedua belah pihak.*

*Dengan demikian, sesuai dengan
kesepakatan yang telah dibuat, pergantian
kepengurusan akan terjadi, setelah ada
pelaksanaan dan keputusan Munas.*

*Saya sudah lama bersahabat dengan mas
Anin. Dan di tengah dinamika ini, saya
bangga, kami setuju untuk menghormati
solusi yang telah disepakati.*

*Mari kita kembali fokus, pada tujuan
utama, Kadin Indonesia. Sebagai mitra
strategis pemerintah, mendorong
pertumbuhan ekonomi, yang inklusif dan
berkelanjutan. Demi cita-cita Indonesia
Emas 2045.*

*Untuk Satu Kadin, Satu Indonesia, dan
Satu masa depan yang lebih baik.*

Arsjad Rasjid
Ketua Umum Kadin Indonesia
Masa Bakti 2021-2026



Silakan pindai QR code berikut
untuk menyaksikan video
pernyataan lengkap Ketua Umum
Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid.

INFOGRAFIS KRONOLOGIS #1 KRONOLOGI KUDETA KADIN MUNASLUB **TIDAK SAH**

Kadin News
September 2024

24

AGUSTUS - 14 SEPTEMBER 2024

PENERBITAN INSTRUKSI ORGANISASI

Pendukung Anindya Bakrie meminta para Ketua Kadin Provinsi untuk menandatangani surat persetujuan Munaslub. Kemudian Dewan Pengurus Kadin Indonesia 3 kali menerbitkan instruksi organisasi ditujukan kepada Pengurus Kadin Indonesia, Kadin Provinsi, Kab/Kota, dan Anggota Luar Biasa (ALB). Isinya penyelenggaraan Munaslub tidak sesuai dengan ART.

13 SEPTEMBER 2024

RENCANA MUNASLUB ILEGAL

MENARA KADIN
INDONESIA, JAKARTA

Beberapa Kadin Provinsi menyambangi Menara Kadin Indonesia Lt. 29 untuk membuat rencana diadakannya Munaslub pada hari Sabtu 14 September 2024.

UNDANGAN MENGHADIRI MUNASLUB DISEBARKAN

Beredarnya Surat undangan Munaslub Kadin 2024 bertanggal 12 September 2024 dimana baru diterima oleh SKI pada 13 September sekitar pukul 18.00, untuk acara yang akan digelar pada Sabtu, 14 September 2024, di Hotel St. Regis Jakarta."

UNDANGAN KONVENSI ALB ILEGAL DISEBAR

Pendukung Anindya Bakrie mengundang Ketua Umum Organisasi Perusahaan, Organisasi Pengusaha ALB Kadin Indonesia untuk menghadiri rapat Konvensi ALB dengan membawa surat mandat dan KTA (Kartu Tanda Anggota).

KONVENSI ALB ILEGAL

RITZ-CARLTON JAKARTA,
MEGA KUNINGAN

Tersebar nya undangan konvensi ALB ilegal guna mendukung pelaksanaan Munaslub. Pendukung Anindya Bakrie mengklaim didukung oleh 28 ALB dari 30 ALB.

14 SEPTEMBER 2024

MUNASLUB KADIN ILEGAL

ST. REGIS JAKARTA

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum dengan klaim didukung oleh 28 Kadin Provinsi dan 25 ALB.

KANTOR KADIN LT. 24 & 29 DIAMBIL ALIH OLEH PENYELENGGARA MUNASLUB

MENARA KADIN
INDONESIA, JAKARTA

Pendukung Anindya Bakrie dan para oknum tidak berkepentingan mengambil alih kantor dan menghalangi karyawan Kadin Indonesia yang bertugas melakukan operasional dan pekerjaan di Lantai 24 dan 29.

15 SEPTEMBER 2024

BLOKADE LOKASI KONFERENSI PERS

LT. 3 MENARA KADIN
INDONESIA, JAKARTA

Pukul 13.00, Arsjad Rasjid bersama Dewan Pengurus yang sah, dan 21 Ketua Kadin Provinsi dijadwalkan menggelar konferensi pers di Sekretariat Kadin Indonesia lantai 3. Namun, pendukung Anindya Bakrie mengerahkan preman untuk berjaga di lobby, memblokade lantai 3, dan mengintimidasi para karyawan dan wartawan yang bertugas di Lantai 3 Kadin Indonesia.

KONFERENSI PERS KETUA UMUM KADIN INDONESIA ARSJAD RASJID

HOTEL JS LUWANSA

Tim Humas Kadin Indonesia segera memindahkan lokasi konpers ke JS Luwansa pada sekitar pukul 13.00, konferensi pers dilakukan di Lantai 3, Hotel JS Luwansa Jakarta. Arsjad ditemani oleh beberapa pengurus Kadin Indonesia, dan 21 Kadin Provinsi, serta perwakilan dari ALB Kadin, menyatakan bahwa Munaslub tanggal 14 September tidak sah. Mayoritas Kadin Provinsi (21 dari 35) mendukung kepemimpinan Arsjad dan tidak mengakui Munaslub.

SARASEHAN FORMATUR MUNASLUB

MENARA KADIN
INDONESIA, JAKARTA

Di hari yang sama, pendukung Anindya Bakrie menyelenggarakan Sarasehan Formatur Munaslub dengan undangan diantaranya Menkumham dan Ketua MPR di Lantai 29 Menara Kadin Indonesia yang dimana akses masuk lantai tersebut tertutup. Dari foto yang ada, sarasehan ini dihadiri oleh beberapa petinggi Munaslub, seperti Anindya Bakrie dan Bambang Soesatyo.



KLAIM



Pendukung Anindya Bakrie Klaim Munaslub Tidak Melanggar AD/ART Karena Memenuhi Kuorum

Anindya Bakrie:

"Munaslub ini inisiatif dari Kadin Daerah, kuorum tercapai dan sesuai AD/ART."

Bambang Soesatyo:

"Kebutuhan daerah yang meminta Munaslub, sesuai AD/ART."

Bayu Djokosoetono:

"Dan kalau disampaikan bahwa pelaksanaan Munaslub ini adalah illegal, sebetulnya kurang tepat, karena memang kita sudah resmi mendapatkan izin dari kepolisian untuk dapat melaksanakan Munaslub ini."

Nurdin Halid Tuduh Arsjad Langgar AD/ART Karena Terlibat Politik

"Organisasi KADIN adalah organisasi independen. Bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik. Ketua umum harus menjaga independensi KADIN. Nah itu salah satu yang tidak bisa dijaga oleh Pak Arsjad."

— **Nurdin Halid, Pimpinan Munaslub Kadin**

Pendukung Anindya Bakrie Menilai Kadin Sulit Dekat dengan Pemerintah

"Rasanya kita sedang menghadapi persoalan serius di Kadin. Mengapa sebagai mitra pemerintah, kita malah sulit untuk dekat dengan pemerintah? Inilah masalah yang sedang kita coba pecahkan hari ini. Setuju, karena bagaimanapun juga, kita adalah mitra strategis pemerintah. Kita harus bisa memberikan rasa nyaman kepada pemerintahan yang akan datang, meskipun saat ini mereka belum resmi terpilih." —

Bambang Soesatyo

Kritik ini disampaikan pada pidatonya di Munaslub Kadin Ilegal (14/09).

FAKTA



Munaslub CACAT HUKUM, Tidak Memenuhi Kuorum dan Menyalahi AD/ART.

Berdasarkan **Pasal 18 Keppres No. 18/2022**, Munaslub hanya sah jika ada pelanggaran serius seperti penyelewengan keuangan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus. Munaslub 14 September 2024 tidak melalui tahapan wajib seperti pemberian Surat Peringatan Pertama dan Kedua, serta tidak adanya pelaksanaan pertanggungjawaban. Kuorum juga tidak tercapai karena **21 dari 35 Kadin Provinsi menolak**.

Hamdan Zoelva menegaskan, "Ketentuan Pasal 18 ayat (1) tidak terpenuhi, termasuk pelaksanaan pertanggungjawaban Dewan Pengurus." Selain itu, syarat permintaan dari 1/2 Kadin Provinsi dan ALB nasional juga tidak terpenuhi.

Hamdan menambahkan, izin dari kepolisian bukan pengesahan legalitas acara. Kepolisian hanya menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi legalitas Munaslub tetap bergantung pada AD/ART Kadin.

Cuti Sementara Arsjad Tak Langgar AD/ART

Untuk menjaga independensi Kadin dan menghindari benturan kepentingan politik, Arsjad mengambil cuti dari Kadin selama menjabat sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud. Yuki Hanafi dikukuhkan sebagai PLH Ketua Umum.

"Sebelum saya memutuskan, saya berkonsultasi dengan Ketua-Ketua Kadin Daerah dan meminta persetujuan mereka. Semua dokumentasinya ada, termasuk Minutes of Meeting (MoM) dan persetujuan dari pihak terkait. Bahkan Anindya Bakrie, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, hadir dalam pertemuan di Balikpapan, dan tidak ada keberatan yang disampaikan." — **Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia**

"Pak Arsjad sebelum menjadi ketua tim sukses salah satu calon presiden sudah meminta persetujuan dari seluruh Kadin provinsi, dan tidak ada yang keberatan." — **Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur**

Arsjad Tegaskan Kadin Selalu Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Selama menjabat, Arsjad Rasjid telah menginisiasi berbagai program strategis untuk mendukung target ekonomi nasional.

- **Wiki Export** yang membantu UMKM ekspor ke Jepang dengan nilai \$1 juta,
- Skema **Inclusive Closed Loop** yang meningkatkan kesejahteraan 1,7 juta petani, Merancang **Peta Jalan Indonesia Emas 2045** Memimpin rancangan
- **White Paper** ekonomi yang akan diserahkan kepada pemerintahan 2024-2029 guna mencapai target pertumbuhan ekonomi **8%**.

SATU KADIN - MAYORITAS KADIN PROVINSI TEGAS DUKUNG KEPENGURUSAN KADIN 2021-2026 YANG SAH

SUARA MAYORITAS TOLAK MUNASLUB

21 dari 35 Kadin Provinsi aktif mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid dan tegas menolak Munaslub versi Anindya Bakrie

"Kami, Kadin daerah, tidak pernah merasa pernah mengusulkan Munaslub.
Kadin daerah tidak merasa 'jauh' dengan pemerintah."

Muhamad Djafar Litty
Ketua Kadin Provinsi Gorontalo

"Siapapun boleh jadi Ketua Umum Kadin selama memenuhi syarat. Siapapun boleh melaksanakan Munaslub tapi ada ketentuan yang diatur -- tidak boleh kita melanggar aturan sendiri."

Cucu Sutara
Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat

"Kami dari Kadin Provinsi menganggap karena tidak memenuhi unsur pelaksanaan Munaslub, itu kita namakan gerakan makar, gerakan kudeta."

Umar Lessy
Pjs Kadin Maluku Utara

"Yang hari ini hadir, ada 21 Ketum Daerah yang sama sekali - kami menolak Munaslub kemarin yang diadakan pada 14 September karena kami menilai bahwa Munaslub ini cacat hukum secara AD/ART Kadin."

Shinta Laksmi Dewi
Ketua Kadin Kalimantan Selatan

"Pak Arsjad sebelum memutuskan jadi timses salah satu calon presiden juga minta persetujuan dari semua kadin provinsi, dan semua kadin provinsi tidak ada yang keberatan, mereka semua tidak ada yang mempermasalahkan, dan juga Pak Arsjad selama jadi timses berinisiatif cuti untuk menjaga netralitas Kadin."

Adik Dwi Putranto
Ketua Kadin Jawa Timur

KONFEDERASI BURUH DUKUNG ARSJAD

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI) mendukung Arsjad Rasjid.

"Kami hanya mengakui Arsjad Rasjid Sebagai ketua umum Kadin Indonesia berdasarkan AD/ART dan Keppres (Keputusan Presiden) yang sampai hari ini belum dicabut."

Andi Gani Nena Wea
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)

"Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, yang diakui negara hanya ada satu Kadin. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo, dengan demikian kalau Kadin terpecah maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang terganggu."

Said Iqbal
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

"Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 Arsjad Rasjid ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia secara sah."

Elly Rosita Silaban
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia



KADIN PROVINSI DI SISI PENGURUS KADIN 2021-2026 YANG SAH

KLAIM



14 SEPTEMBER 2024



Bambang Soesatyo, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia
"...28 Ketua umum Kadin daerah hadir."

Sumber (14/9): bit.ly/bamsoet-cnbc



14 SEPTEMBER 2024



Nurdin Halid sebut Munaslub telah kuorum karena dihadiri 21 pengurus Kadin Provinsi

Sumber (14/9): bit.ly/nh-kompas



14 SEPTEMBER 2024



Thomas Jusman, Ketua Kadin Bangka Belitung, nyatakan Munaslub dihadiri lebih dari 20 Kadin Provinsi

Sumber (14/9): bit.ly/tj-tribun



15 SEPTEMBER 2024



Anindya Bakrie klaim 21 Pengurus Provinsi Hadiri Munaslub

Sumber (15/9): bit.ly/anin-kompas



25 SEPTEMBER 2024



Sebanyak lima Ketua Umum Kadin Provinsi tadi telah melaporkan sejumlah oknum ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang mencatut seolah mereka mendukung Munaslub.

"Jadi, lima Ketua Umum Kadin Provinsi ini telah melapor ke polisi sehubungan dengan pencatutan nama atau pemalsuan surat yang seolah mereka hadir atau mendukung pelaksanaan Munaslub,"
Denny Kailimang, Kuasa Hukum Kadin Provinsi

Sumber: bit.ly/kd-bisnis

FAKTA



Berdasarkan AD/ART, syarat kuorum adalah sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah Kadin Provinsi dan 1/2 dari ALB sebagai Peserta Penuh.

Sementara, Munaslub hanya dihadiri 13 Kadin Provinsi dari total 35 Kadin Provinsi atau TIDAK KUORUM.

ALB yang hadir juga seharusnya merupakan utusan dari Konvensi ALB yang dilaksanakan paling lambat 3 hari sebelum Munaslub (berdasarkan PO 287 Kadin Indonesia).

Namun, Konvensi ALB baru dilaksanakan pada 13 September 2024 atau hanya 1 (satu) hari sebelum diadakannya Munaslub.



15 SEPTEMBER 2024

Konferensi Pers Bersama Ketua Kadin Daerah Pendukung Arsjad, Ketua Umum Legal.



21 Ketua Kadin Provinsi tidak mengakui Munaslub, mereka adalah:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Kalimantan Timur | 12. Papua Barat Daya |
| 2. Maluku | 13. Jawa Barat |
| 3. Maluku Utara | 14. Kalimantan Selatan |
| 4. NTT | 15. DI Yogyakarta |
| 5. Papua | 16. DKI Jakarta |
| 6. Papua Barat | 17. Gorontalo |
| 7. Provinsi Bengkulu | 18. Jambi |
| 8. Riau | 19. Jawa Timur |
| 9. Sulawesi Tengah | 20. Kalimantan Barat |
| 10. Sulawesi | 21. Jawa Tengah |
| 11. Sulawesi Utara | |

HE SAID THEY SAID MUNASLUB LEGAL ATAU ILEGAL?

PENDUKUNG ANINDYA BAKRIE

"Munaslub itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran Kadin. Dan yang menyelenggarakan itu adalah para Kadinda dan Anggota Luar Biasa Kadin yang merupakan pengusul. Kadinda daerah ada 18 yang utuh.

Kemudian sebagai pengusul, kemudian 28 daripada Asosiasi Luar Biasa. Tapi Munaslub dilakukan eh peserta dari Kadinda itu menjadi 28. Eh maaf ya, 28. Ini adalah fakta. Ini adalah administratif ini sudah sangat kuorum."

Sumber: bit.ly/cnbc-nurdin

Nurdin Halid
Pimpinan Munaslub



"Proses Munaslub ada proses dari awal ini sejak bulan April kita sampaikan dan saya sampaikan langsung kepada ketum Arsjad dimana Pak Ketum ini ada Pelanggaran adalah Undang Nomor 1 Tahun 87 yang ketua Kadin tidak boleh berpolitik."

Sumber: bit.ly/kompas-jd
(6:09 - 6:27)

Mulyadi Jayabaya
Mantan Ketua Kadin
Provinsi Banten



PENGURUS KADIN INDONESIA 2021-2026

"Munaslub harus memenuhi dua syarat: alasan yang jelas dan prosedur sesuai Pasal 18 Ayat 1, yaitu pelanggaran AD/ART, penyelewengan keuangan, atau Kadin tidak berfungsi. Namun, tidak ada pelanggaran atau alasan mendesak."

"Selain itu, Munaslub harus diinisiasi oleh 50% + 1 dari Kadin Provinsi dan setengah dari ALB yang memiliki hak suara, serta didahului dua peringatan tertulis dengan jeda 30 hari. Dalam kasus ini, syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, sehingga Munaslub dinyatakan tidak sah."

Sumber: bit.ly/kp-kompas

Hamdan Zoelva
Kuasa Hukum



Sebanyak lima Ketua Umum Kadin Provinsi tadi telah melaporkan sejumlah oknum ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang mencatut seolah mereka mendukung Munaslub (25/9).

"Jadi, lima Ketua Umum Kadin Provinsi ini telah melapor ke polisi sehubungan dengan pencatutan nama atau pemalsuan surat yang seolah mereka hadir atau mendukung pelaksanaan Munaslub."

Sumber: bit.ly/kd-bisnis

Denny Kailimang
Kuasa Hukum Kadin Provinsi



"Munaslub harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu Anggaran Dasar, dan melalui tahapan yang ada. Munaslub dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus terkait pelanggaran prinsip AD/ART, masalah keuangan, atau tidak berfungsinya Kadin.

Tahap pertama, diberikan peringatan. Setelah 30 hari, jika peringatan tidak digubris, dikeluarkan peringatan kedua. Jika tidak ada perubahan dalam 30 hari, barulah Munaslub bisa diajukan oleh minimal 50% Kadin Provinsi dan ALB yang hadir di Munas sebelumnya. Semua tahapan ini harus dilewati agar Munaslub sah."

Sumber: bit.ly/kompas-jd
(13:36 - 13:41)

Dhaniswara K Harjono
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum &
HAM Kadin Indonesia



TANGGAPI POLEMIK KADIN, ISTANA: INI INTERNAL BUKAN POLITIK

KETUA UMUM KADIN INDONESIA 2021-2026

Arsjad Rasjid

"I am very clear bahwa pemerintah itu bijak, mencari apa yang terbaik, yang terbenar secara hukum. Saya percaya itu."

bit.ly/check-andy



Ari Dwipayana

KOORDINATOR STAF KHUSUS PRESIDEN

"Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki internal sesuai AD/ART Kadin, Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin."

Sumber: bit.ly/ari-ksp

PRESIDEN

Joko Widodo

"Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha sehingga saya minta selesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya."



Sumber: bit.ly/presiden-kadin



SEMENTARA ITU, MENKUMHAM NYATAKAN KEPUTUSAN KEPPRES KADIN ADA DI PRESIDEN

"Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin. Aturannya seperti itu, namun nanti kan semua keputusan Presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian,"

Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Sumber: bit.ly/ham-tempo

INFOGRAFIS #7

KONFLIK KEPENGURUSAN KADIN AKAN DISELESAIKAN MELALUI MUNAS

HASIL KESEPAKATAN ANTARA ARSJAD RASJID DAN
ANINDYA BAKRIE TENTANG KADIN INDONESIA



1

Jumat, 27 September 2024

- Telah dilaksanakan pertemuan antara Ketua Umum Kadin Indonesia Masa Bakti 2021-2026, Arsjad Rasjid, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie (AB), dan Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia.



Anindya Bakrie
Ketua Dewan Pertimbangan
Kadin Indonesia
(kiri)

Bahlil Lahadalia
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral
(tengah)

M. Arsjad Rasjid P.M.
Ketua Umum Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (2021-2026)
(kanan)

- Pertemuan ini menyetujui bahwa solusi terkait dinamika internal yang terjadi di Kadin Indonesia adalah melalui penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas)
- Kesepakatan ini telah ditandatangani di atas materai oleh semua pihak yang hadir
- Kepanitiaan Munas akan dibentuk bersama oleh kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku
- Munas akan dilaksanakan setelah pelantikan Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Waktu dan tempat pelaksanaan Munas akan mengikuti arahan dari pemerintah.

AKSI DAN KLAIM PASCA KESEPAKATAN 27 SEPTEMBER 2024

PENDUKUNG ANINDYA BAKRIE

28 September 2024

Anindya Bakrie, memberi pernyataan di setelah menghadiri Dialog Kebangsaan IKA Unpad bahwa pertemuannya dengan Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid pada 27 September kemarin **merupakan suatu kebetulan dan membuka peluang Arsjad Rasjid mendampingi beliau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.**

"Jadi semuanya itu tentu kita juga lanjutkan dengan Menteri ESDM (Bahilil Lahadalia). Dan apalagi kebetulan di situ juga ada sahabat saya, pak Arsjad."

"Saya sangat terbuka apabila pak Arsjad mendampingi saya. Sekarang karena sudah diberikan amanat, 14 September jadi ketua umum, saya sangat terbuka apabila pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan."

Anindya Bakrie



Langgar Kesepakatan, Anin Klaim Sudah Sah jadi Ketum Kadin dan gelar berbagai acara

- **30 September** - Bersilaturahmi ke kantor Kementerian BUMN dan bertemu Erick Thohir.
- **30 September** - Menggelar Sarasehan bersama Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita di Kantor Kadin Indonesia.
- **2 Oktober** - Menggelar sarasehan bersama Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto di Menara Kadin Indonesia.
- **3 Oktober** - Menggelar sarasehan bersama Menkominfo, Budi Arie
- **5 Oktober** - Bersilaturahmi dan beraudiensi dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Adi
- **7 Oktober** - Menggelar diskusi ekonomi bersama pengusaha internasional senior Pak Hashim Djojohadikusumo, sekaligus mengumumkan Dewan Pengurus Baru Kadin Indonesia 2024-2029

PENGURUS KADIN INDONESIA 2021-2026

28 September 2024

Arsjad memberi pernyataan bahwa **pertemuan tanggal 27 september sudah disepakati sebuah solusi yang tegak lurus aturan organisasi.**

30 September 2024

Arsjad Rasjid kemudian meluruskan dan menegaskan bahwa **pertemuan tersebut bukan sebuah kebetulan dan sudah disepakati bahwa dinamika ini diselesaikan melalui munas.**

"Jumat 27 September 2024, pukul 3 sore, Pak Bahilil mengundang saya dan Mas Anin ke kediaman beliau. Di mana pertemuan tersebut telah direncanakan dan disampaikan kepada kami beberapa hari sebelumnya."

"Kami sepakat untuk mengadakan musyawarah nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah."

Arsjad Rasjid



**Komitmen Terhadap Kesepakatan:
Arsjad Rasjid Persiapkan Proses Munas**

- **3 Oktober** - Memimpin pertemuan koordinasi dengan 497 anggota Luar Biasa Kadin Indonesia untuk persiapan Munas IX
- **3 Oktober** - Mengadakan makan malam bersama pemimpin redaksi untuk meluruskan isu-isu yang berkembang termasuk mempromosikan whitepaper arah pembangunan ekonomi 2024-2029 yang telah disusun oleh Kadin Indonesia
- **6 Oktober** - Website resmi Kadin Indonesia tiba-tiba diblokir tanpa ada alasan jelas
- **7 Oktober** - Dewan Pengurus Kadin 2021-2026 menegaskan bahwa Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Dewan pengurus Kadin turut menggarisbawahi tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud

MENUJU PERSIAPAN PELAKSANAAN MUNAS IX



1

"Kadin Indonesia telah menyelesaikan rapat konsolidasi dengan Anggota Luar Biasa (ALB) pada 3 Oktober 2024, yang dihadiri oleh 497 peserta baik offline dan online, dimana mewakili ALB sebanyak 149 yang hadir dalam kegiatan tersebut."



Eka Sastra
WKU Bidang Organisasi
Kadin Indonesia

2

Sesuai AD/ART, pelaksanaan Munas harus melewati tahapan-tahapan penting.

Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional):

- Mempersiapkan agenda strategis Munas IX.
- Dalam Rapimnas, seluruh perwakilan Kadin Provinsi dan ALB akan diundang untuk membahas arah organisasi serta mekanisme Munas.
- Di sini akan menetapkan mekanisme pemilihan, pendaftaran, dan verifikasi peserta Munas secara transparan dan inklusif, melibatkan semua unsur organisasi.

Konvensi ALB:

- Semua ALB yang ingin berpartisipasi dalam Munas harus mengikuti proses pendaftaran, verifikasi, dan validasi keanggotaan.
- Proses ini dilakukan secara formal sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin.
- Tujuannya adalah memastikan bahwa semua ALB terdaftar secara sah dan memiliki hak suara yang valid untuk berpartisipasi dalam Munas. Mekanisme ini penting untuk menjaga transparansi dan keabsahan Munas.

Pelaksanaan Munas:

- Munas IX, sebagai forum tertinggi dalam Kadin, akan dilaksanakan setelah Rapimnas dan Konvensi ALB selesai.
- Munas akan diadakan setelah pelantikan Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, dan waktu pelaksanaannya akan disesuaikan dengan arahan pemerintah.
- Untuk Munas dapat dinyatakan sah, quorum harus terpenuhi, yaitu dengan kehadiran 50% + 1 dari seluruh Kadin Provinsi serta setengah dari total ALB yang memiliki hak suara.
- Jika quorum tidak terpenuhi, Munas tidak dapat dilaksanakan dan keputusan strategis tidak dapat diambil.

TANTANGAN DAN INTERVENSI MENUJU PELAKSANAAN MUNAS IX

1

Minggu, 6 Oktober 2024, Website Resmi Kadin Indonesia tidak bisa diakses

- Website resmi Kadin Indonesia www.kadin.id tidak bisa diakses



- Kadin Indonesia sudah bersurat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Bapak Budi Arie Setiadi, pada 6 Oktober 2024 dan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA), Bapak Hokky Situngkir untuk menormalisasi akses website resmi Kadin Indonesia pada hari Senin (07/10) agar dapat kembali beroperasi sesuai tupoksi Kadin Indonesia sebagai wadah pengusaha Indonesia sekaligus mitra strategis pemerintah yang bersifat mandiri sesuai UU no 1 tahun 87 dan Keppres no 18 tahun 2022.

2

Senin, 7 Oktober 2024, Pengumuman Pengurus Kadin Indonesia versi Anindya Bakrie

Versi Kadin Anindya Bakrie

- Kadin versi Anindya Bakrie mengumumkan susunan kepengurusan baru 2024-2029.
- Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya

Pengurus Sah Kadin 2021-2026

- Kadin Indonesia menegaskan bahwa pengumuman kepengurusan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, **tidak sesuai dengan AD/ART organisasi dan kesepakatan yang telah dicapai pada 27 September 2024 lalu.**
- Kepengurusan Kadin yang sah saat ini adalah hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang diselenggarakan di Kendari pada tahun 2021 lalu, dan kepengurusan tersebut akan tetap berjalan hingga Munas IX diadakan.

17 SEPTEMBER 2024

[3 Serikat Buruh Tetap Dukung Arsjad Rasjid Sebagai Ketua Kadin](#)

18 SEPTEMBER 2024

[Arsjad Rasjid Jawab Kudeta di Kadin : Saya Tidak Gila Jabatan](#)

18 SEPTEMBER 2024

[Kick Andy Double Check : Drama Kudeta Kadin](#)

18 SEPTEMBER 2024

[Ini Alasan Munaslub Tidak Sah](#)

18 SEPTEMBER 2024

[21 Kadin Provinsi Dukung Arsjad Rasjid, Sebut Munaslub Gerakan Kudeta](#)

18 SEPTEMBER 2024

[Kisruh Kadin, Iklim Investasi Jadi Taruhan](#)

19 SEPTEMBER 2024

[Polemik Kursi Panas Kadin, Arsjad Rasjid : Munaslub Ilegal](#)

20 SEPTEMBER 2024

[Arsjad Rasjid Cerita Kondisi Kantor Sementara Kadin](#)

20 SEPTEMBER 2024

[Kisruh Kadin Pecah, Ada Apa di Balik Dualisme Kepemimpinan Kadin](#)

FGD/SEMINAR

Penyampaian Pandangan Industri Melalui Kadin Indonesia Sepanjang bulan September untuk Sektor Properti, Perdagangan dan Perumahan

Selama bulan September, Kadin Indonesia secara aktif menyampaikan pandangan dan aspirasi dari sektor industri properti, perdagangan, dan perumahan melalui partisipasi aktif di berbagai seminar. Diskusi tersebut bertujuan untuk memahami tantangan terkini dan mencari solusi guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan di sektor-sektor strategis ini.



Memajukan Industri Properti: Kadin Indonesia Dorong Partisipasi Sektor Swasta

Guna mewujudkan kemajuan sektor properti, Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu, Budiarsa Sastrawinata, berbagi pandangan dengan menjadi narasumber dalam Mandiri Sekuritas Property Forum pada 17 September 2024. Melalui paparannya, Budiarsa membahas tren terkini di sektor properti dan prospek pertumbuhannya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengungkapkan pengaruh signifikan dari Generasi Z dan milenial yang kini semakin mendominasi pasar properti.



Ia juga menekankan bahwa generasi muda tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga aktif dalam membentuk dinamika pasar. Selain itu, forum ini membahas rencana pemerintah untuk meluncurkan program pembangunan tiga juta rumah sebagai solusi terhadap kekurangan perumahan yang menjadi tantangan besar di Indonesia. Diskusi juga mencakup kepemilikan asing di sektor properti serta pertumbuhan pusat perbelanjaan di luar Pulau Jawa, yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian regional. Budiarsa juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendorong kemajuan di bidang properti. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat krusial untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan merealisasikan visi Indonesia Emas 2045.



Kadin Indonesia Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Global Lewat International Export Summit 2024

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, menjadi narasumber dalam kegiatan International Export Summit 2024, dengan tema "Export Business Digitally: Accelerate Your Global Reach", pada 17 September 2024 di Jakarta. Juan menekankan pentingnya memanfaatkan alat dan platform digital untuk meningkatkan ekspor Indonesia serta memperluas jangkauan pasar global, yang diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Dalam pembahasannya, Juan menyoroti bahwa platform e-commerce dan alat digital lainnya telah membuka peluang baru bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjangkau pembeli global tanpa hambatan geografis. Juan juga mengajak para pelaku usaha untuk berpikir global dan menjadikan produk lokal sebagai pemain utama di pasar internasional, sekaligus menyampaikan komitmen Kadin Indonesia dalam memberikan pelatihan bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

Kadin Indonesia Soroti Ketahanan Perumahan di Masa Krisis

Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur, Insannul Kamil, menjadi salah satu narasumber dalam seminar nasional yang bertemakan Tantangan Ketahanan Perumahan dan Bangunan Indonesia di Masa Krisis, pada 20 September 2024. Dalam paparannya, Insannul menekankan bahwa ketahanan perumahan tidak semata-mata soal membangun rumah yang kokoh, melainkan tentang menciptakan lingkungan hunian yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks ini, penggunaan standar konstruksi yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi inovatif menjadi sangat penting untuk memastikan bangunan dapat bertahan lama dan berkualitas tinggi. Lebih jauh, Insannul mengingatkan bahwa pembangunan perumahan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Konsep hunian yang inklusif, di mana setiap orang memiliki akses ke fasilitas yang memadai, dianggap sebagai fondasi penting dalam menciptakan ketahanan perumahan yang sejati.



PROGRAM PENGURUS

Impact Investment Day 2024: Kolaborasi Kadin Indonesia & Yayasan Bambu Lestari untuk Dorong Ekonomi Restoratif dan Berkelanjutan



Kadin Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) menggelar Impact Investment Day (IID) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), 7-8 September 2024, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024. Mengusung tema "Championing Sustainable and Restorative Initiatives in Indonesia", IID bertujuan mendorong inisiatif restoratif dan berkelanjutan dengan menghubungkan para inisiator dengan investor maupun pemangku kepentingan lainnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menyampaikan setidaknya ada dua tantangan utama dalam pengembangan ekonomi restoratif dan berkelanjutan di Indonesia, yaitu kesenjangan investasi dan kebijakan yang masih terbatas. Mengacu laporan terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Indonesia diperkirakan butuh Rp892 triliun hingga 2045 untuk melaksanakan strategi ekonomi restoratif di berbagai sektor secara efektif.



"Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, kita harus mendorong impact investment dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Hal ini perlu didukung oleh kebijakan yang bisa menarik minat investor untuk berinvestasi yang memberikan dampak berkelanjutan pada masyarakat sekitar, lingkungan dan juga bisnis. Misalnya, melalui penerapan kebijakan pajak progresif yang berkeadilan atau insentif lainnya bagi inisiatif restoratif dan berkelanjutan", ujar Ketua Umum Kadin Indonesia.

Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin Indonesia dan Dewan Pengarah IID, Bambang Brodjonegoro mengatakan, "Melalui Impact Investment Day, kami mengajak dunia usaha untuk melihat melampaui kepatuhan dan merangkul ESG sebagai katalis inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Ini bukan lagi tentang memenuhi standar minimum, tetapi tentang memimpin perubahan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis, masyarakat, dan planet tempat kita hidup."

IID dirancang sebagai wadah untuk menjembatani penggerak dampak, seperti perusahaan sosial, organisasi komunitas, dan LSM, dengan para pendukung dampak, termasuk investor, donor, serta organisasi filantropi. Melalui IID, Kadin Indonesia bersama YBLL mendorong pembangunan berkelanjutan khususnya di wilayah Indonesia Timur.

PROGRAM PENGURUS

Kolaborasi dengan PERSOLKELLY, Kadin Indonesia Luncurkan CEO School



Kadin Indonesia bekerja sama dengan PERSOLKELLY meluncurkan program CEO School pada Rabu, 3 September 2024. Program ini merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing para pemimpin perusahaan (CEO) khususnya dalam mempertajam keterampilan kepemimpinan, membangun jaringan bisnis, serta mendorong kolaborasi antar perusahaan.



CEO School juga menjadi langkah awal menuju pembentukan Kadin Institute Indonesia, sebuah inisiatif untuk mencetak pemimpin dan tenaga kerja yang kompeten di era teknologi yang terus berkembang. Dengan pendekatan ini, Kadin Indonesia berupaya menjawab kebutuhan dunia usaha terhadap SDM yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.



PROGRAM PENGURUS

Indonesia - Japan Fast Track Pitch 2024 Dorong Kerjasama UMKM dan Teknologi



Indonesia - Japan Fast Track Pitch 2024 yang digelar pada 25 September 2024 merupakan ajang penting untuk membahas perkembangan teknologi dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini juga diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan Jepang. Perwakilan dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Japan External Trade Organization (JETRO), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), serta pelaku bisnis dari negara-negara ASEAN turut menghadiri kegiatan ini.

Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryoprato, dalam kesempatan ini menyoroti pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia sebagai peluang besar bagi UMKM untuk berkembang. Aldi menjelaskan bahwa salah satu inisiatif yang didorong Kadin Indonesia adalah inisiatif platform WikiExport, yang dirancang untuk mendukung UMKM dengan menyediakan informasi, pelatihan, pendampingan, hingga sertifikasi yang sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha untuk menembus ekspor ke pasar internasional.

Aldi menambahkan, teknologi memegang peranan penting dalam menghubungkan UMKM dengan peluang ekspor yang lebih luas. Ia juga berharap kehadiran WikiExport dapat memberikan akses lebih mudah bagi UMKM untuk tumbuh dan bersaing di pasar global.

Selain membahas perkembangan teknologi, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperluas network bagi para pengusaha Indonesia, startup, dan perusahaan di kawasan Asia Tenggara serta Jepang. Para peserta mendapat kesempatan untuk menjalin kerja sama yang dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, baik di Indonesia maupun negara-negara mitra.

KOLABORASI INTERNASIONAL

Kadin Perkuat Jaringan Bisnis Internasional melalui MoU Bersama Kuba dan Panama

Sesuai dengan amanah UU No.1 Tahun 1967, Kadin Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mempromosikan dan memperkuat perekonomian nasional lewat kerjasama internasional strategis, termasuk: promosi investasi, peningkatan ekspor, serta negosiasi perdagangan internasional. Yang dilakukan Kadin Indonesia selama bulan September 2024, termasuk:

MoU Kadin Indonesia dan Kuba: Dorong Kerja Sama di Bidang Perdagangan, Investasi, dan Pengembangan Ekonomi



Kadin Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Chamber of Commerce of Cuba pada 16 September 2024 di Havana. Kerja sama ini melingkupi berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, dan pengembangan ekonomi. Ini menjadi simbol yang menunjukkan bahwa Indonesia serius untuk menjajaki potensi pasar Kuba, sekaligus menjalin hubungan yang lebih intensif dalam berbagai sektor.

Penandatanganan MoU ini sekaligus menjadi langkah awal untuk membuka peluang perdagangan baru bagi kedua negara, sekaligus memperkuat keunggulan komparatif masing-masing negara di pasar global.

MoU Signing Kadin Indonesia dengan Panama: Pererat Hubungan Diplomatik yang Berfokus pada Perdagangan dan Investasi

Setelah penandatanganan MoU dengan Kuba, Kadin Indonesia kembali melakukan penandatanganan MoU dengan Chamber of Commerce, Industries and Agriculture of Panama, pada 18 September 2024 di Panama City. Momen penandatanganan MoU ini turut disaksikan oleh Duta Besar LBBP RI untuk Panama, Y.M. Sukmo Harsono, dan diharapkan dapat membuka peluang baru dalam perdagangan dan investasi.



Ruang lingkup kerjasama termasuk pengembangan sektor industri dan perdagangan, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar Amerika Tengah, sekaligus memperluas akses pasar bagi produk Indonesia.



FORBISDA 2024: Dukungan Kadin Indonesia Bagi Penguatan Perdagangan Antardaerah

Kadin Indonesia, bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pangan Nasional, sukses menyelenggarakan Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) di Surabaya pada 19 September 2024. Mengusung tema "Meningkatkan Perdagangan dan Bisnis Antar Daerah Untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Serta Kolaborasi Bisnis yang Berkelanjutan," forum ini bertujuan mendorong sinergi antar wilayah untuk menciptakan stabilitas harga, meningkatkan distribusi barang yang efektif, serta memperkuat ketahanan pangan, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, yang mewakili Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya optimalisasi perdagangan antar daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. "Kami mengapresiasi inisiatif Kadin, APKASI, dan Badan Pangan Nasional dalam memperkuat perdagangan antar wilayah melalui FORBISDA ini," ungkapnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, setiap wilayah di Indonesia, termasuk Indonesia bagian Timur memiliki potensi yang beragam, dengan daya saing di pasar domestik maupun internasional yang berbeda. "Sebagai induk organisasi usaha nasional, kami melihat terdapat berbagai potensi produk-produk unggulan Jawa Timur dan Indonesia Timur yang senantiasa perlu untuk ditingkatkan secara optimal. Maka, tantangan terkait distribusi pencatatan yang belum akurat perlu diselesaikan bersama," imbuh Arsjad.

(lanjutan di halaman 42)



Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjourang, menyampaikan bahwa Forum Bisnis Daerah (Forbisda) diharapkan dapat mengoptimalkan ekonomi daerah Indonesia Timur dengan mempertemukan para kepala daerah agar bisa saling bertukar informasi terkait produk unggulan masing-masing yang bisa diperdagangkan satu sama lain. Selain itu, mempertemukan kepala daerah dengan sektor usaha untuk mendorong penyerapan komoditas daerah.



Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto menambahkan, kolaborasi dan sinergi lewat Forum Bisnis Daerah (Forbisda) ini bisa meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar lokal, regional, nasional, dan internasional.



Forum ini juga menjadi ajang penting guna meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha guna memaksimalkan potensi produk unggulan setiap daerah, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi yang selama ini menjadi kendala. FORBISDA 2024 juga mencatat berbagai kesepakatan bisnis yang berpotensi besar, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) senilai hampir Rp 773 miliar. MoU ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia, memperkuat kolaborasi bisnis antar daerah, serta menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka dan kompetitif.





Ketua Umum
Masa Bakti
2021-2026



KADIN INDONESIA

1968-2024



HARI ULANG TAHUN KE-56 KADIN INDONESIA

Kadin Indonesia Rayakan HUT Ke-56 dengan Aksi Solidaritas dan Serukan Jaga Persatuan



Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 di tanggal 24 September 2024, Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengadakan kunjungan ke Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 di Jakarta Timur. Selain merupakan bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab Kadin terhadap masyarakat, termasuk bagi para lansia, kunjungan ini juga menjadi bagian dari bentuk ucapan syukur atas bertambahnya usia Kadin Indonesia.

Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 merupakan salah satu panti sosial yang dikelola oleh negara, menampung hingga 240 orang lansia dengan latar belakang yang beragam. Panti ini bertujuan memberikan perawatan serta tempat tinggal yang layak bagi para lansia, baik yang terlanter maupun yang membutuhkan bantuan khusus. Panti ini juga menjadi rumah bagi mereka yang tidak lagi memiliki keluarga atau yang sudah tidak mampu untuk mandiri, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup para penghuninya di usia senja.

Berdasarkan data Kementerian Sosial pada tahun 2023, populasi lansia di Indonesia terus meningkat, termasuk sekitar 2 juta lansia terlanter. Untuk itu penanganan dan perhatian terhadap kelompok ini menjadi semakin krusial. Lansia yang terlanter di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga kesepian dan kehilangan rasa tujuan. Namun, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 menyediakan beragam kegiatan yang bermanfaat, mulai dari belajar memainkan alat musik, bercocok tanam, hingga beternak ikan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menjaga keterlibatan mereka secara sosial, tetapi juga memberi kesempatan bagi para lansia untuk tetap aktif dan produktif.

Dalam rangka HUT ke-56 Kadin Indonesia, kunjungan Dewan Pengurus Kadin Indonesia ke panti ini sejalan dengan semangat "*no one left behind*" dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dewan Pengurus berinteraksi langsung dengan para penghuni panti melalui permainan dan hiburan bersama, sekaligus memberikan bantuan berupa sound system, mesin cuci, dan donasi lainnya. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kadin Indonesia untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial, khususnya bagi kalangan yang rentan seperti lansia, sebagai bagian dari visi besar menuju masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.





HARI ULANG TAHUN KE-56 KADIN INDONESIA

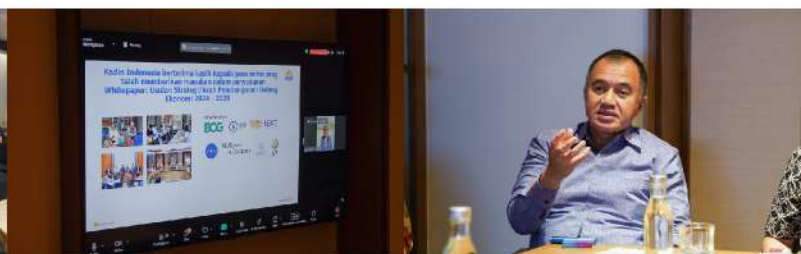
Syukur HUT ke-56 Kadin Indonesia: Memperkuat Kerja Sama untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Momentum perayaan ulang tahun Kadin Indonesia ke-56 berlangsung meriah pada Rabu, 25 September 2024 di The Bimasena, dihadiri oleh keluarga besar pengurus Kadin Indonesia dan daerah. Dalam momen ini, Kadin Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong kesolidan organisasi melalui tata kelola (governance) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.



Selain menjadi ajang silaturahmi dan hiburan, dalam kegiatan ini juga ditampilkan highlight hasil White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi 2024-2029. Secara hybrid yang hadir presentasi menampilkan 7 prioritas menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Sesi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari tujuh mitra dan perwakilan Tim Transisi Presiden Terpilih Prabowo-Gibran, yaitu Dirgayuza Setiawan, Mulya Amri, dan Fakhrul Fulvian.

Di tengah dinamika Kadin Indonesia, maka fokus perayaan HUT Kadin Indonesia kali ini kembali ke dasar yaitu jejaring dan substansi program dalam rangka merealisasikan visi & misi program.





HARI ULANG TAHUN KE-56 KADIN INDONESIA

Gelar Sesi Ask Me Anything, Kadin Indonesia Perkuat Silaturahmi dan Soliditas Pelaku Usaha



Sebagai bagian dari refleksi perjalanan organisasi yang ke 56 tahun, Kadin Indonesia menggelar sesi AMA (Ask Me Anything) secara virtual pada 25 September 2024. Sesi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dan dihadiri oleh Dewan Pengurus Lengkap, Kadin Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin dengan total 250 peserta.



Selain bertujuan untuk memperkuat silaturahmi, sesi ini juga dimanfaatkan untuk memberikan update terkait dinamika organisasi terkini bersama perwakilan Kadin Daerah dan ALB. Dengan format tanya jawab yang terbuka, para peserta secara langsung menyampaikan pertanyaan dan masukan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia. Sesi ini juga menjadi wadah diskusi terkait implementasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi saat ini.

Melalui sesi ini, Ketua Umum Kadin Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi di antara anggota Kadin Indonesia untuk memastikan organisasi ini tetap solid dan relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.

DIRGAHAYU KE-56

KADIN INDONESIA

1968-2024





INDONESIA INTERNATIONAL SUSTAINABILITY FORUM 2024

Dua Hari Digelar, Indonesia International Sustainability Forum 2024 Berhasil Gaet 11.000 Peserta dari lebih 73 Negara, Bahas Isu Keberlanjutan



Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, yang berlangsung pada 5-6 September 2024 di JCC Senayan, Jakarta, sukses menarik perhatian publik dan para pemangku kepentingan. Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan hadir secara langsung untuk meresmikan pertemuan yang menggaet lebih dari 11.000 peserta dari 73 negara ini. ISF 2024 tidak hanya menyatukan pejabat kementerian, pemimpin dunia, akademisi, dan pelaku usaha, tetapi juga mengundang berbagai tokoh penting dalam upaya menemukan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi dunia.



Dalam konferensi pers yang diadakan, Menko Luhut B. Pandjaitan menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme yang tinggi dalam acara ini dan menekankan pentingnya kesadaran keberlanjutan di kalangan generasi muda. Deputi Rachmat Kaimuddin turut menambahkan bahwa ISF 2024 menjadi langkah nyata dalam kolaborasi antara negara maju dan berkembang untuk mengatasi krisis iklim. Forum ini membahas solusi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan melalui dukungan finansial dan nonfinansial, termasuk teknologi, sumber daya manusia, kebijakan, dan kolaborasi internasional.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menyoroti potensi ISF 2024 untuk menarik investor, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung UMKM dalam membentuk lanskap ekonomi Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia menegaskan bahwa forum ini juga bertujuan memperkuat ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan regional bersama ASEAN di pasar global.

(lanjutan di halaman 49)



Pada hari pertama ISF 2024, Ketua Umum Kadin Indonesia juga mengisi sesi keynote speech tentang "*ASEAN Sustainability Pathway*," yang menekankan pentingnya masa depan rendah karbon untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Turut hadir pula pembicara lain dalam sesi konferensi pers sekaligus bertugas sebagai ISF Advocates, seperti Chelsea Islan, Dion Wiyoko, dan Lady Diandra, yang turut memberikan pandangan mereka tentang masa depan keberlanjutan di ASEAN dan global.



Momen Kebersamaan di Gala Dinner ISF 2024: Wujudkan Komitmen Indonesia Menuju Keberlanjutan

Kegiatan Gala Dinner Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 berlangsung meriah pada malam 5 September 2024 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Ma'Ruf Amin yang menekankan pentingnya ajang ini sebagai momen strategis untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam mencapai masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Gala Dinner ISF 2024 menjadi momen kebersamaan bagi para pemangku kepentingan untuk mengapresiasi inisiatif-inisiatif yang mendukung upaya keberlanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.



Selain menjadi ajang silaturahmi, Gala Dinner ini juga digunakan sebagai wadah untuk memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam upaya keberlanjutan, baik di sektor ekonomi sosial, maupun lingkungan. Acara ini terbukti telah memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



INDONESIA INTERNATIONAL SUSTAINABILITY FORUM 2024

Penguatan Kerjasama Keberlanjutan: Kadin Indonesia Teken Sejumlah Nota Kesepahaman dan Umumkan Joint Statement selama ISF 2024

Selama ISF 2024, Kadin Indonesia juga mengadakan berbagai sesi Joint Statement dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan para pemangku kepentingan utama dalam isu keberlanjutan. Kolaborasi ini mencakup kesepakatan strategis dengan sektor swasta, pemerintah, dan organisasi internasional, yang bertujuan mempercepat langkah konkret menuju pembangunan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, Kadin Indonesia berupaya memperkuat ekosistem keberlanjutan nasional dan global, menciptakan inovasi, serta memperluas kesempatan bagi sektor-sektor yang mendukung masa depan rendah karbon.

Penguatan Pasar Karbon dan Transisi Energi: Kadin Indonesia Tandatangani MoU dengan BloombergNEF dan Rumah PATEN di ISF 2024



Komitmen Kadin Indonesia terhadap dekarbonisasi dan transisi energi tertuang melalui penandatanganan MoU bersama BloombergNEF dan Rumah PATEN yang diadakan pada 5 September 2024 di ISF 2024. MoU berfokus pada pengembangan Carbon Center of Excellence dan bertujuan memperkuat pasar karbon sebagai alat penting dalam upaya dekarbonisasi dan pembiayaan iklim. Selain itu, penandatanganan MoU dengan Rumah PATEN, diharapkan dapat mendukung transisi energi dan pengembangan ekonomi rendah karbon di sektor ketenagalistrikan.

Selama ISF 2024, Kadin Indonesia juga mengadakan berbagai sesi Joint Statement dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan para pemangku kepentingan utama dalam isu keberlanjutan. Kolaborasi ini mencakup kesepakatan strategis dengan sektor swasta, pemerintah, dan organisasi internasional, yang bertujuan mempercepat langkah konkret menuju pembangunan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, Kadin Indonesia berupaya memperkuat ekosistem keberlanjutan nasional dan global, menciptakan inovasi, serta memperluas kesempatan bagi sektor-sektor yang mendukung masa depan rendah karbon.

(lanjutan di halaman 51)

Kadin Indonesia Luncurkan Program Blue Halo S di ISF 2024 untuk Keberlanjutan Laut



Dalam rangka menjaga keberlanjutan laut, Kadin Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), serta Konservasi Indonesia secara resmi meluncurkan program Blue Halo S pada hari kedua gelaran ISF 2024, 6 September 2024.

Fokus utama Blue Halo S adalah budidaya perairan berkelanjutan serta perlindungan keanekaragaman hayati laut. Dengan dukungan dari Green Climate Fund (GCF), program ini akan mendorong pengembangan teknologi budidaya canggih, memperkuat infrastruktur, dan memberikan pelatihan kepada bisnis lokal.





Sebagai mitra strategis Kemenko Marves dalam pengadaan ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Kadin Indonesia berpartisipasi dalam gelaran expo dengan mengadakan booth yang mengusung konsep *sustainable*, dengan luas 27m².

Booth Kadin Indonesia berfungsi untuk memperkenalkan organisasi Kadin Indonesia, menarik keanggotaan, serta memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dalam mendorong inisiatif bisnis berkelanjutan. Selain itu, booth ini juga menjadi wadah untuk memamerkan program-program unggulan Kadin yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia, dengan harapan dapat menginspirasi lebih banyak pelaku usaha untuk terlibat aktif dalam agenda keberlanjutan.

Poin-poin yang Menjadi Fokus Pembahasan di ISF 2024

Nota Kesepahaman (MoU)

Bloomberg NEF	Pengembangan Carbon Center of Excellence. Bertujuan memperkuat pasar karbon dalam upaya dekarbonisasi dan pembiayaan iklim.
Rumah PATEN	Mendukung transisi energi dan pengembangan ekonomi rendah karbon di sektor ketenagalistrikan.
Program Blue Halo S	Fokus pada budidaya perairan berkelanjutan serta perlindungan keanekaragaman hayati laut.

Diskusi Panel

TERA Program	Fokus pada pentingnya kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam restorasi ekosistem bakau serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam bisnis.
Rise of Sustainability & ESG in Indonesia	Memperdalam pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia

11,000+
Pendaftar

73
Negara

60
Pembicara

11
High Level
Keynote Speaker

25
Exhibitors

Terima Kasih kepada Sponsor



Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia adalah fasilitas hukum organisasi yang memberikan manfaat bagi anggota Kadin dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Beberapa Jenis Layanan yang diberikan oleh Kadin Indonesia



Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia



Cara Mendapatkan Layanan



Untuk Informasi Lanjutan
Silahkan Hubungi:

Hotline Kadin Indonesia

+62-811-9631-0204



**Urgensi untuk melakukan
pengkinian data bagi pengurus
Kadin Indonesia**

Silakan cek **WhatsApp Hotline
(0895-6113-40500)** atau **Email** Bapak/Ibu
Pengurus, Segera Akses Link untuk Lakukan
Pengkinian Data

MANFAAT

Keanggotaan **Kadin**

Nikmati ragam keuntungan dan manfaat dengan menjadi bagian dari **keanggotaan Kadin Indonesia**



Update terhadap
Perkembangan Ekonomi
dan **Bisnis**



Dukungan dalam
Penerapan **Net Zero**



Dukungan **Advokasi**



Kemudahan **Pembuatan**
Surat Keterangan



Scaling up skill/
Kemampuan Wirausaha
dan Pekerja



Akses terhadap **Market**



Tumbuhkan Bisnis melalui
Network dan **Kolaborasi**



Dukungan terhadap
Transformasi Digital



Kesempatan **Promosi**



Potongan Harga Menarik
dari Mitra-Mitra Kadin



Terlibat dalam
Penyusunan Kebijakan
Industrial

CARA PENDAFTARAN Anggota Kadin



Scan QR Code atau
kunjungi **anggota.kadin.id**



1 Klik **"Daftar Anggota"**, lalu pilih jenis keanggotaan



2 Membuat akun dengan mendaftarkan **email** dan **NIK**



3 Menerima notifikasi pendaftaran akun dari **info.anggota@kadin.id**



4 Masuk dengan akun yang didaftarkan



5 Lengkapi formulir dengan data yang diperlukan

Persyaratan yang dibutuhkan

- ✓ Email Penanggung Jawab
- ✓ NIB Perusahaan
- ✓ AKTA Perusahaan
- ✓ NPWP Perusahaan
- ✓ KTP Direksi
- ✓ Foto Pass Direksi
- ✓ No HP Penanggung Jawab



6 Menerima notifikasi dan unduh invoice pembayaran



7 Melakukan pembayaran ke rekening/ virtual account yang tertera di invoice



8 Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



9 Download **KTA-B**, Anda telah resmi menjadi anggota Kadin

CARA MEMPERPANJANG KEANGGOTAAN KADIN

Hotline Keanggotaan
0813 8862 8081 | 0813 9830 2790



Kunjungi **anggota.kadin.id**



Masukan Email dan kata sandi, lalu klik **"Masuk"**



Klik menu **"KTA"**, lalu klik menu **"Perpanjang KTA"**



Menerima notifikasi perpanjangan keanggotaan dan invoice dari **info.anggota@kadin.id**



Melakukan pembayaran ke rekening/virtual account yang tertera di invoice



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



Download **KTA-B**, Anda telah memperpanjang keanggotaan Kadin

FITUR TERBARU

Website **Kadin.id**



Forum Anggota Kadin

Dibuat sebagai tempat **berbagi informasi** seputar bisnis, *networking*, dan diskusi interaktif seputar perkembangan dunia usaha. Forum Anggota Kadin dikelola oleh Sekretariat Kadin Indonesia sebagai administrator.

Layanan Kadin



Halaman-halaman yang menonjolkan **layanan sekretariat** dan **manfaat keanggotaan**

Info Advokasi Kadin



Tempat untuk menghimpun informasi mengenai **perkembangan advokasi terkini** yang dilakukan oleh Kadin

KABAR TERKINI

Prof Jimly Ingatkan Putusan MK Soal Wadah Tunggal Kadin Indonesia

Sumber: Hukumonline.com

Kala itu, MK menolak membatalkan Pasal 4 UU Kadin yang menetapkan Kadin sebagai wadah tunggal bagi pengusaha di Indonesia. Jimly mengingatkan agar pemerintah turut bertanggung jawab dan tidak lepas tangan atas kisruh yang terjadi di internal Kadin Indonesia.

Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie mengingatkan dalam kisruh di internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, negara atau pemerintah harus hadir bertanggung jawab. Sebab, keberadaan Kadin diatur lewat UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (UU Kadin) dan kepengurusannya disahkan lewat Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Jimly menegaskan pemerintah atau negara tak bisa lepas tangan begitu saja terhadap kisruh di internal Kadin yang terjadi akibat polemik dualisme kepemimpinan Ketua Umum Arsyad Rasyid atau Anindya Bakrie. "Ingat Kadin itu jangan dilihat sebagai lembaga swasta, Kadin itu sudah diputuskan MK di zaman saya, Kadin itu adalah lembaga negara dalam arti luas. Walaupun dalam praktik kita susah sebagai lembaga negara, tapi dia lembaga publik. Negara punya tanggung jawab untuk memastikan dia tidak pecah," kata Jimly saat dikonfirmasi, Rabu (18/9/2024).

Mantan Ketua MK Periode 2003-2008 ini mengingatkan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Pasal 4 UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (UU Kadin) pada 12 April 2005. Kala itu, MK menolak membatalkan Pasal 4 UU Kadin yang menetapkan Kadin sebagai wadah tunggal bagi pengusaha di Indonesia. Menariknya, putusan MK yang menolak permohonan uji materi UU Kadin ini terdapat tiga anggota Majelis MK yang mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yaitu Maruarar Siahaan, Abdul Mukthie Fadjar, dan Harjono.

Selengkapnya, Pasal 4 UU Kadin berbunyi: "Dengan Undang-undang ini ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan."

Merujuk pada Pasal 9 UU Kadin, kepengurusan organisasi itu disahkan lewat Keppres. Lalu, dalam pasal 11 dan 12 UU Kadin ini terdapat perintah pengawasan yang harus dilakukan pemerintah dan sanksi atas penyimpangan yang terjadi dalam UU ini. Selanjutnya, pemerintah dapat mencabut Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 9.

Ia menerangkan saat masih menjabat sebagai ketua MK ada ide untuk membuat Kadin tandingan yakni Kadin UMKM dengan dasar prinsip *freedom of organization* atau kemerdekaan berorganisasi. Namun, ide itu ditolak di MK. "Dulu (juga) ada ide membuat Kadin tandingan, Kadin UMKM, kami tolak, tidak boleh, karena mereka berargumen Kadin ini hanya mengurus pengusaha besar, mereka mau bikin Kadin UMKM berdasarkan prinsip *freedom of organization*," kata Jimly.

Putusan MK kala itu, kata Jimly, tegas menyatakan Kadin bukan ormas, sehingga tidak tunduk pada prinsip kebebasan berorganisasi dan berserikat. Akhirnya, Kadin tandingan itu batal didirikan. "Sehingga tidak tunduk pada prinsip freedom of organization, kemerdekaan berorganisasi. Tidak boleh, Kadin hanya satu saja. Nah, negara punya kepentingan, jangan sampai ketentuan UU, ketentuan anggaran dasar dari Kadin itu dilanggar, tapi ini cermin dalam politik king. Jadi mengabaikan (menggunakan) segala cara untuk (kepentingan) hawa nafsu. Tapi penyelesaian tergantung pemerintah kan, tentu masing-masing pihak berargumen sudah benar."

Ada dua jalan

Menurut Jimly, ada dua jalan menyelesaikan permasalahan polemik dualisme kepemimpinan Kadin itu yakni melalui dengan pengadilan atau mediasi. Namun, ia mengimbau agar kedua belah pihak jangan mau dirusak dengan permainan politik jangka pendek.

"Kalau dia merasa diberlakukan secara tidak adil, tentu ada pihak ketiga yang meleraikan melalui cabang kehakiman, bisa PTUN. Kita lihat bagaimana ini, kita serahkan pada mekanisme. Kita tidak boleh berpihak. Jadi jangan karena permainan politik jangka pendek kita bisa merusak tradisi negara ber hukum dan beretika. Mungkin ada mediasi tanpa pengadilan itu juga bisa. Mediasi saja biar Arsjad tidak merasa didzalimi, tapi kalau Anindya cocok juga ketua umum itu, gantian lah, cuma caranya kurang mulus, itu aja," ungkapnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini, polemik kepemimpinan Kadin itu terjadi ketika Anindya Bakrie terpilih menjadi ketua umum dalam Munaslub yang diklaim dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi pada Sabtu (14/9/2024). Ia melengserkan Arsjad Rasjid yang sejatinya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan Keppres penetapan Anindya sebagai Ketua Umum Kadin baru segera terbit. Politikus Gerindra itu tampak hadir dalam konferensi pers Kadin kubu Anindya di Jakarta, Minggu (15/9/2024) kemarin.

Di lain pihak, Dewan Pengurus Kadin Indonesia kubu Arsjad mengadakan rapat pengurus yang diperluas dengan dihadiri oleh 21 Ketua Kadin Provinsi pada Minggu (15/9/2024), menjatuhkan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Munaslub yang dianggap ilegal tersebut.

Melalui kuasa hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad, Hamdan Zoelva menyatakan Munaslub yang menetapkan Anindya sebagai ketua umum Kadin baru tidak sah alias ilegal. Sebab, Munaslub tersebut tidak sesuai atau melanggar dengan UU Kadin, Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin, dan AD/ART Kadin Indonesia.

Selanjutnya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirim surat kepada Presiden dan Menteri Hukum dan HAM untuk meminta pengawasan dan penundaan proses pembuatan Keppres baru terkait kepengurusan Kadin sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1987 dan Keppres No. 18 Tahun 2022.

Sementara itu, Presiden Jokowi berpesan agar kisruh Munaslub Kadin Indonesia yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum menggantikan Arsjad Rasjid bisa diselesaikan secara internal. Ia pun mengimbau agar kisruh Kadin tersebut kemudian tidak dikaitkan dengan pemerintah terutama dirinya.

"Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti 'bola panasnya' didorong ke saya," ujar Jokowi sambil terkekeh seperti dikutip Antara, Selasa (17/9/2024).

Sekilas Tentang Kadin for Naker

Kadin for Naker hadir dalam bentuk **platform digital** untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri sekaligus menjadi platform link & match antara tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Kadin for Naker merupakan **program pengembangan kapasitas** inisiatif Kadin Indonesia bersama dengan Serikat Buruh di Indonesia dan didukung oleh Pijar Foundation.

Manfaat Kadin for Naker untuk Pekerja

-  Materi pembelajaran yang dapat diakses **kapan saja**
-  Materi yang disesuaikan dengan **kebutuhan industri**
-  Lowongan kerja dari perusahaan yang **terverifikasi**

Manfaat Kadin for Naker untuk Perusahaan

-  Sarana **peningkatan kualitas SDM** bagi perusahaan
-  **Keterampilan pekerja** yang terverifikasi
-  Peningkatan kapasitas pekerja untuk kinerja yang **lebih optimal**
-  Pencarian tenaga kerja berdasarkan **kompetensi** yang dicari

Kategori Kelas di Kadin for Naker

Mencari Pekerjaan

Pengembangan Diri

Mencari Pendapatan Tambahan

Program Komputer

Bahasa

Keterampilan Industri Spesifik

Tata Cara Mendaftar Kadin for Naker



wikiexport

Wiki Export adalah platform pengembangan UMKM berbasis website dan AI chatbot. Wiki Export memiliki misi untuk meningkatkan kontribusi ekspor UMKM dengan membuat UMKM Indonesia siap export melalui pemberian informasi, pelatihan dan sertifikasi.

Solusi WikiExport



Informasi terkurasi melalui
Website



Pelatihan berbasis
video



Layanan 24 Jam berbasis
chatbot



Kursus & sertifikasi
melalui workshop



"Melalui proses Business Matching, kami merasakan manfaat yang luar biasa, bisa bertemu dengan calon-calon partner di Jepang yang sudah terkurasi oleh Wiki Export bersama JETRO. Dengan memanfaatkan network yang ada di dalam Kadin, saya berharap proses ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Saya yakin sekali UMKM itu tidak hanya kuat di Indonesia, tapi justru bisa relevan di dunia"

Irvan Helmi
Co-Founder Pipiltin Cocoa

Mari bergabung dan dapatkan akses ke pelatihan, pendampingan, dan berbagai akses informasi yang dirancang untuk membantu usaha Anda menembus pasar internasional.



Daftar ke wikiexport@kadin.id
Menara Kadin Indonesia Lt. 3
Jl. H. R. Rasuna Said X-5, Kav 2-3,
Jakarta 12950

“Menuju Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan”

NZH adalah sebuah inisiatif dari dunia usaha untuk mencapai *Net Zero Emission* di Indonesia. Bersama Kadin, mari wujudkan komitmen perusahaan anda menuju *Net Zero*, melalui:

Science Based Emission

Emission Reduction

Climate Mitigation

Climate Adaptation

Daftar sekarang juga ke

secretariat@netzerohub.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950



Netzerohub.id

EKSPOR BARANG ANDA KE SELURUH DUNIA MELALUI TRADE

TRADE adalah platform Sentra Layanan Dokumen Elektronik KADIN Indonesia yang membantu pembuatan dokumen ekspor seperti *COO*, *Certificate of Export Goods*, *Certificate of Free Sale*, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

Tahapan-tahapan untuk membuat dokumen ekspor:



Klik **Masuk** atau **Daftar** untuk masuk maupun mendaftar akun.

Masukkan alamat email dan password. Jika belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dengan klik **Daftar**.



Pilih **Document Registration** untuk melengkapi data-data mengenai perusahaan.



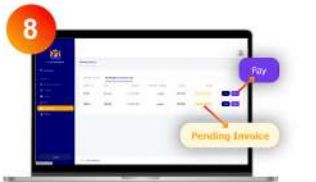
Lengkapi data-data dan unggah dokumennya, lalu klik **Save Changes**.



Pilih **Create COO** lalu pilih form yang sesuai kebutuhan dengan klik **Create**



Isi form dengan melengkapi data Itinerary dan Goods Item dan unggah dokumennya.



Setelah selesai mengisi form, tunggu beberapa saat hingga status berubah dari **Waiting for Approval** menjadi **Waiting for Payment**. Lalu buka menu **Transaction**, pilih **Pending Transaction**, lalu klik **Pay**. Kemudian lakukan pembayarannya menggunakan **virtual account** yang tertera.



Setelah pembayaran dilunaskan, COO **Siap Dicetak** dan digunakan.

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi Help desk:

☎ +62 882-1975-0620 (LEO) ☎ +62 882-9208-4913 (ALDI)



SCAN QR
ATAU KUNJUNGI
edocs.kadin.id/



Mari menjadi bagian dari **ekosistem bisnis Indonesia** dengan bergabung Kadin Indonesia



tinyurl.com/pendaftarananggotakadin



Program-Program Kadin Indonesia Telah
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Jadilah Bagian Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sebagai **Sponsor Kadin Indonesia**



Kegiatan Utama Kadin Indonesia 2024



**Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia**
17 Agustus



**Hari Ulang Tahun
Kadin Indonesia**
24 September



**Rapimnas
Kadin Indonesia**
Q4 2024



**Kadin Impact Award
Sepanjang Tahun**
2024



**Quarterly Regulatory
Outlook 2024**



**Quarterly Policy
Outlook 2024**

Informasi lanjutan tentang kerja sama dan
kolaborasi dapat menghubungi

Andri (+62 8560 306 7593)

Terbangkan Potensi Ekonomi Bersama, Mencapai Visi Indonesia Emas 2045!



Kadin Indonesia dan Garuda Indonesia berkolaborasi untuk memberikan **kemudahan** dan **kenyamanan** bagi seluruh anggota Kadin Indonesia, dalam melakukan **perjalanan udara** di dalam maupun luar negeri

Manfaat yang dapat diperoleh Anggota Kadin Indonesia

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Internasional

POTONGAN HARGA

3%

Rute Domestik

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Middle East

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Interline

Kemudahan lain yang dapat dimiliki Anggota Kadin Indonesia



Memiliki ekstra bagasi
hingga **5 kilogram**



Mendapatkan kemudahan
program MICE jika bepergian
dalam kapasitas 100 orang



Memiliki **akses check-in**
pada **counter khusus**



Mendapatkan **staf sales khusus**



Segera daftarkan dirimu menjadi
Anggota Kadin Indonesia dan nikmati
manfaat untuk melakukan perjalanan bersama

Garuda Indonesia

Nikmati Benefit Eksklusif sebagai Anggota Kadin Indonesia bersama Hyundai!

Optimalkan mobilitas bisnis Anda dengan **potongan** harga istimewa dari Kadin Indonesia x Hyundai hingga **50 juta rupiah***



IONIQ 5



IONIQ 6

Mobil Listrik



Santa Fe



Stargazer



Creta



Palisade



Staria

Mobil Non-Listrik

Tata cara pembelian:

1. Hubungi nomor Kadin Indonesia yang tertera untuk melakukan verifikasi anggota aktif Kadin Indonesia yang telah memiliki KTA-B
2. Setelah melakukan verifikasi, pihak Hyundai Indonesia akan segera menghubungi Anda untuk melanjutkan proses transaksi

* Potongan harga berbeda-beda untuk masing-masing jenis mobil

Informasi lebih lanjut hubungi:

+62 813-8801-2200
(Kadin Indonesia)



KADIN INDONESIA



Informasi lanjutan terkait **pasar internasional** dapat ditemukan di sini:

bsd-kadin.id

wikiexport



Temukan informasi menarik bagi **pengembangan bisnis UMKM** di sini:

wikiexport.ai



Temukan layanan **pengurusan dokumen dagang** di sini:

trade.kadin.id



Ikut bergabung dalam ekosistem **bisnis berkelanjutan** di sini:

netzerohub.id



Kembangkan kapasitas dan kesempatan meningkatkan jenjang karir di sini:

kadinfornaker.id

Disusun oleh
Humas Sekretariat Kadin Indonesia

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484



kadin.indonesia.official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



www.kadin.id